

SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
TERHADAP KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kab/Kota di Aceh)**



Disusun Oleh:

**RIZKI FITRAYANDI
NIM. 170602076**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
2022 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Fitrayandi
NIM : 170602076
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang Menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
99BB6AJX720729222
Rizki Fitrayandi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap
Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota Di Aceh)**

Disusun Oleh:

Rizki Fitrayandi
NIM. 170602076

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Khairul Amri, S.E, M.Si
NIDN. 0106077507

Pembimbing II,



Azimah Dianah, SE, M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

A R - R Mengetahui Y
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Rizki Fitrayandi
NIM. 170602076

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota Di Aceh)

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi S1 Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil Akhir 1444 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Khairul Amri, S.E, M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji I

Dr. Zainuddin, S.E, M.Si
NIP.

Sekretaris,

Azimah Dianah, SE, M.Si, Ak
NIDN. 2026028803

Penguji II

Intan Qurratulaini, S.Ag, M.Si
NIP. 197612172009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafas Furfani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizki Fitrayandi
NIM : 170602076
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah
E-mail : rizki.fitra12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

**Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota Di Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Rizki Fitrayandi
NIM:170602076

Khairul Amri, S.E, M.Si.
NIDN: 0106077507

Azimah Dianah, S.E, M.Si.Ak
NIDN: 2026028803

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkai kan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Rusydi), Ibunda (Zuryati) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan karunia-Nya karena telah memberikan kita umur panjang serta kesehatan. Salawat beserta salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah atas jalan kemudahan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi penelitian yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota Di Aceh)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah..
3. Hafiih Maulana S.P., S.H.I., M.E. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Khairul Amri S.E., M.Si selaku pembimbing I yang mana telah banyak memberikan masukan serta saran dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan Azimah Dianah, SE., M. Si.Ak selaku pembimbing II yang mana telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tak bosan-bosannya memberi arahan dan

nasehat kepada peneliti demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Farid Fathony Ashal Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) peneliti selama proses menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta Ayahanda Rusydi serta Ibunda Zuryati yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan ketika penulis putus asa, yang selalu menyemangati dan menyayangi serta do'a yang tiada henti kepada penulis.
7. Teruntuk teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2017 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.
8. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

جامعة الرانيري Banda Aceh 20 Desember 2022

AR - RANIRY Penulis,

Rizki Fitrayandi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Kaifa : كيف

hauला : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatulatfā : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah : الْمَدِينَةُ

الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasa



ABSTRAK

Nama : Rizki Fitrayandi
NIM : 170602076
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota Di Aceh)
Pembimbing I : Khairul Amri, SE., M.Si
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak.

Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kota Provinsi Aceh. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh harus mengoptimalkan alokasi anggaran belanja daerah yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung agar mampu menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Menggunakan data dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2016-2020, panel regresi dengan metode *fixed effect model* dioperasionalkan untuk menguji hubungan antar variabel tersebut. Penelitian menemukan bahwa belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Begitu pula, penelitian ini menemukan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Tingkat Kemiskinan.*

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
2.1 Kemiskinan	10
2.1.1 Pengertian Kemiskinan	10
2.1.2 Kategori Kemiskinan.....	12
2.1.3 Penyebab Terjadinya Kemiskinan.....	14
2.1.4 Pengukuran Kemiskinan	15
2.1.5 Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi Islam	15
2.1.6 Indikator Kemiskinan	21

2.2	Belanja Langsung	24
2.2.1	Pengertian Belanja Langsung	24
2.2.2	Indikator Belanja Langsung	25
2.3	Belanja Tidak Langsung	26
2.3.1	Pengertian Belanja Tidak Langsung	26
2.3.2	Indikator Belanja Tidak Langsung	27
2.4	Penelitian Terkait	29
2.5	Kerangka Berfikir	36
2.5.1	Keterkaitan Antara Belanja Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	36
2.5.2	Keterkaitan Antara Belanja Tidak Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	37
2.5.3	Keterkaitan Antara Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	39
2.6	Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		42
3.1	Jenis dan Pendekatan	42
3.2	Sumber Data	42
3.3	Teknik Pengumpulan Data	43
3.4	Operasional Variabel Penelitian	43
3.4.1	Variable dependen	43
3.4.2	Variabel Independen	44
3.5	Metode analisis data	45
3.5.1	Estimasi model regresi	46
3.5.2	Pemilihan Model Regresi Data Panel	47
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	48
3.6	Uji Hipotesis	50
3.6.1	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	50
3.6.2	Uji Hipotesis Secara Simultan atau Bersama-Sama (Uji F)	50
3.6.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Aceh.....	52
4.1.1 Geografi.....	52
4.1.2 Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	53
4.1.3 Agama dan Budaya Provinsi Aceh.....	54
4.2 Analisa Deskriptif.....	55
4.2.1 Analisa Deskriptif Kemiskinan	55
4.2.2 Analisa Deskriptif Belanja Langsung	57
4.2.3 Analisa Deskriptif Belanja Tidak Langsung	59
4.3 Hasil Penelitian	61
4.3.1 Statistik Deskriptif.....	61
4.3.2 Koefisien Korelasi.....	63
4.3.3 Estimasi Model Regresi Data Panel.....	64
4.3.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	66
4.3.5 Model Regresi Data Panel Terpilih.....	68
4.3.6 Pengujian Asumsi.....	70
4.4 Pengujian Hipotesis	73
4.5 Hasil Pembahasan.....	75
4.5.1 Belanja Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam	75
4.5.2 Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perpektif Ekonomi Islam.....	77
4.5.3 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	79
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penduduk Miskin Di Aceh.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terkait	32
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian	45
Tabel 4.1	Daerah Administrasi Provinsi Aceh.....	54
Tabel 4.2	Persentase Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2020.....	57
Tabel 4.3	Anggaran Belanja Langsung Per Kapita Kab/Kota Provinsi Aceh 2016-2020	59
Tabel 4.4	Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kapita Kab/Kota Aceh 2016-2020	61
Tabel 4.5	Hasil Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.6	Koefisien Korelasi	64
Tabel 4.7	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	65
Tabel 4.8	Hasil fixed effect model Sebagai Model Regresi Terpilih.....	69
Tabel 4.9	Nilai Uji Glejser	71
Tabel 4.10	Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.11	Uji Hipotesis Berdasarkan Model Regresi Terpilih.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Presentase Penduduk Miskin di Aceh	4
Gambar 2.1	Skema Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1	Peta Provinsi Aceh	53
Gambar 4.2	Residual Metode Common Effect Model	68
Gambar 4.3	Residual Metode Fixed Effect Model	68
Gambar 4.4	Residual Metode Random Effect Model.....	68
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sangat rumit yang dialami di sebuah negara dikarenakan hal tersebut tak saja terlibat dengan rendahnya tingkat kemiskinan itu sendiri, kemiskinan didefinisikan dengan suatu keadaan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang dasar seperti sandang, papan, dan pangan. Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengartikan miskin sebagai keadaan kehidupan yang dialami seseorang atau rumah tangga dan serba berkekurangan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan yang layak bagi kehidupannya (Naylal Fithri dan David Kaluge, 2017).

Dalam suatu negara berkembang seperti Indonesia masih banyak terdapat masalah ketidakadilan serta kemiskinan. Persoalan tersebut dapat dikatakan masih belum dipecahkan secara maksimal. Maka dari itu, dalam pembangunan di Indonesia, isu-isu sosial ekonomi yang selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan, seperti masalah ketidakadilan dan kemiskinan (serta pengangguran). Masalah tersebut telah terjadi sejak lama serta menjadi kenyataan. Islam memandang masalah kemiskinan kerap terjadi dikarenakan akibat ketidaksanggupan suatu individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut hukum Islam, kebutuhan dasar terbagi atas tiga yakni sandang, papan, dan pangan.

Perihal kemiskinan masyarakat mulai meningkat kembali sejak terjadinya ketegangan dalam bidang ekonomi di masa sekarang sedang tidak baik semenjak adanya wabah virus yang menyebar mulai dari bulan Februari sampai saat ini. Lahirnya COVID-19 telah merubah perekonomian

dunia. Penamanaan 2019- nCoV disematkan World Health Organization (WHO) untuk coronavirus penyakit yang ditemukan pada tahun 2019, dengan sebutan COVID-19. Memiliki dampak yang sangat luar biasa di seluruh dunia tidak ketinggalan juga dengan desa-desa yang ada di Indonesia.

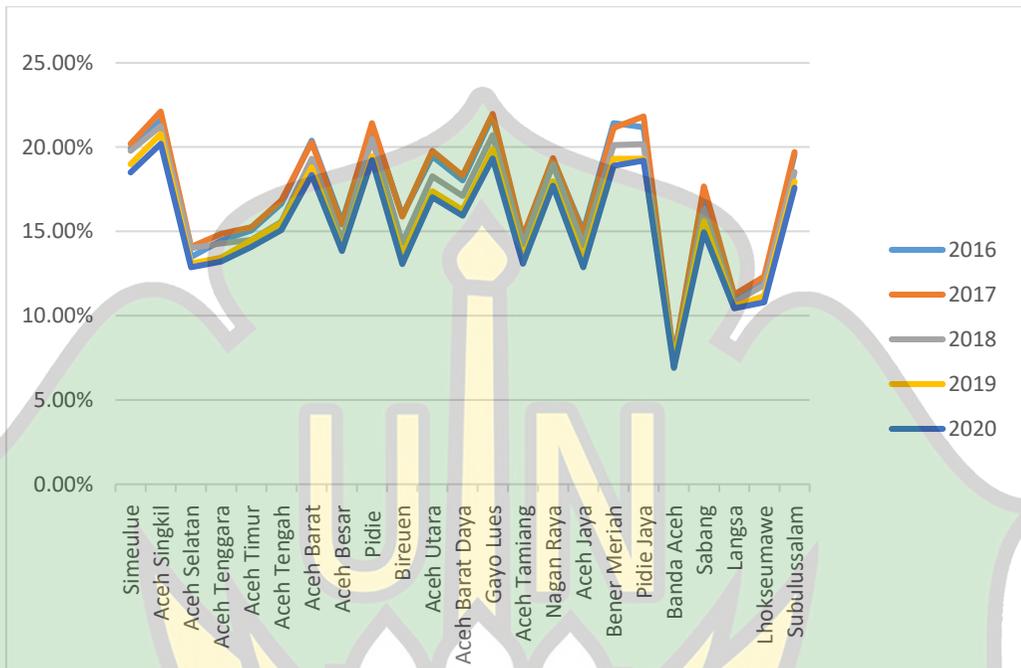
Dampak COVID-19 menyerang semua lini yang ada dalam masyarakat mulai dari elit masyarakat sampai masyarakat kelas menengah kebawah. Masyarakat kelas menengah ke atas mungkin terganggu dari sector usaha seperti impor ekspor atau dalam segi investasi. Masyarakat memilih melakukan nya secara hati hati dan bahkan ada yang tidak berani melakukan nya sama sekali di masa pandemi ini karna para investor ini takut akan perekonomian yang anjlok. Sementara di masyarakat kelas menengah ke bawah mereka mendapati tekana yang lebih kuat seperti Pembertian Hak Kerja (PHK), hilangnya lapangan kerja, daya jual pertanian dan perternakan yang menurun serta bahan pangan yang menjadi pokok kebutuhan sehari hari mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Sehingga peristiwa ini sangat meresahkan masyarakat.

Islam merupakan ideologi yang shahih, serta sangat berfokus pada masalah kemiskinan beserta upaya dalam pengentasannya. Dalam istilah fiqih, terdapat pembagian mengenai kemiskinan, yaitu Fakir dan Miskin. Fakir menurut syara' merupakan individu yang tidak memiliki apa-apa sama sekali, sedangkan menurut syara' Miskin merupakan individu yang memiliki perkejaan namun tidak memiliki kecukupan harta dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Melalui kedua definisi, dapat dikatakan bahwa Fakir telah tergolong dalam kriteria miskin. Kedua istilah tersebut sikonsepkan dalam suatu istilah yaitu miskin, yang memiliki definisi individual yang tidak memiliki kecukupan harta dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya diantaranya sandang, papan dan pangan.

Kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu indikator pemicu terjadinya kemiskinan. Kurangnya tingkat kesejahteraan dapat menunjukkan rendahnya tingkat produktivitas. Penggunaan sumber daya yang kurang maksimal dan optimal disebabkan oleh kinerja yang kurang baik. Pakar membuat kesimpulan tentang kemiskinan memiliki tiga penyebab diantaranya terbatasnya sumber daya, akses permodalan yang kurang, serta kualitas SDM yang buruk (Cahya Nugraha, R, & Hendry Cahyono, 2020). Republik Indonesia adalah wilayah yang termasuk memiliki problematika dalam kemiskinan, masyarakat Indonesia mempunyai taraf kesejahteraan yang tergolong pada tingkatan level yang relatif rendah. Belakangan tahun terakhir tingkat kemiskinan di negara ini kunjung pulih. Jumlah masyarakat miskin terdapat dalam data jumlah di setiap Kab/Kota di Indonesia.

Sebagai halnya didalam Pasal 33 dalam UUD 1945, menyebutkan bahwa: “perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan”, dan Pasal 34 menggarisbawahi bahwa: “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Perihal tersebut menyebutkan jika negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan. Meskipun substansi mengenai definisi-definisi tersebut pada intinya sama, namun secara konseptual kesejahteraan memiliki makna yang relatif berbeda.

Gambar 1.1
Grafik Presentase Penduduk Miskin di Aceh



Sumber : BPS Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat di lihat jumlah masyarakat miskin yang terdapat pada tiap Kota/Kabupaten pada Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Daerah penduduk miskin terendah dengan jumlah persentase diperoleh di kota Banda Aceh sebesar 7,41% di tahun 2016 serta 6,9% di tahun 2020. Selain itu, daerah dengan jumlah presentase penduduk miskin tertinggi terdapat pada kabupaten Aceh Utara sebesar 19,46% pada tahun 2016 dan 17,02% pada tahun 2020. Oleh karena itu, Provinsi Aceh menjadi lokasi penelitian yang dipilih peneliti dikarenakan Aceh merupakan Provinsi dengan jumlah presentase penduduk miskin yang tinggi, maka dari itu peneliti ingin melihat apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang menjadi fasilitator Program-program unggulan provinsi Aceh mempunyai peranan langsung maupun tidak terhadap peningkatan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan

turunnya tingkat jumlah masyarakat miskin yang ada di Aceh (Badan Pusat Statistik, 2020).

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang keluarganya memiliki pendapatan absolut. Institusi pemerintahan menentukan garis kemiskinan dan disesuaikan setiap tahunnya guna mencerminkan perubahan ukuran dan tingkat harga pada keluarga (Mankiw, 2012). Belanja dan beban memiliki makna konsep yang berbeda, belanja didefinisikan dalam suatu ukuran dana kewajiban yang digunakan untuk operasional pemerintah, hutang, atau pemakaian modal pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, belanja pemerintah ialah suatu penurunan asset dana bersih yang tidak termasuk dalam hasil dari transfer ke dana lainnya.

Belanja daerah meliputi biaya operasional, transfer, belanja tak terduga, dan belanja pada modal. Belanja modal adalah sejumlah dana yang dikeluarkan atau penganggaran dana untuk membeli asset baik itu tetap maupun aset-aset lainnya serta berguna dalam pemanfaatan untuk beberapa periode akuntansi. belanja dalam pengelompokan belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah penganggaran dana belanja yang tak berhubungan langsung terhadap program serta kegiatan yang dilaksanakan.

Belanja langsung adalah penganggaran dana untuk pelaksanaan program atau kegiatan dan terkait secara langsung yang terdiri dari: belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Sedangkan pengeluaran yang tak terkait secara langsung dengan program maupun kegiatan disebut dengan belanja tidak langsung. Kesejahteraan masyarakat Belanja langsung didefinisikan sebagai pengeluaran dana (belanja) yang telah dianggarkan secara langsung mengenai pelaksanaan kegiatan seperti: belanja barang serta jasa, belanja pegawai, dan belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tak berkaitan secara langsung mengenai kegiatan atau program-program yang

dijalankan. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta meningkatkan kualitas layanan publik, jumlah atau proporsi dalam belanja dapat diubah oleh pemerintah daerah untuk didistribusikan untuk tujuan serta sebab yang berdifat positif, antara lain melakukan kegiatan dalam pembangunan yang memiliki keterkaitan terhadap kepentingan publik.

Dalam gambaran belanja langsung, belanja yang ditujukan guna peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum atau program langsung dapat mendorong peningkatan tingkat produksi pada masyarakat dan BUMD. Selain dari itu, pengeluaran (belanja) pemerintah daerah tergolong dalam pelayanan mendasar yang wajib didapat oleh masyarakat, antara lain pendidikan serta kesehatan. Berdasarkan konsepnya, belanja tidak langsung tak memiliki dampak maupun memengaruhi kebutuhan khalayak umum untuk melaksanakan bisnisnya. Akan tetapi melalui pengalokasian belanja tidak langsung yang wajar dapat mendukung performa antar departemen kerja terhadap pelayanan masyarakat (Sasana, 2012).

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti tentang pembelanjaan langsung dan pembelanjaan tidak langsung diantaranya adalah Jouzar Farouq Ishak (2017) yang hasilnya mengemukakan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan secara negative pada Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, belanja tidak langsung berdampak terhadap kemiskinan secara positif. Penelitian ini dilakukan dikarenakan terdapat penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jouzar (2017). Selain itu, terdapat hasil penelitian yang berbeda yang diteliti oleh sejumlah penulis, serta belum ditemukan adanya penelitian yang menggunakan variable belanja langsung atau belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan masyarakat pada kabupaten atau kota di Provinsi Aceh.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melihat kembali perspektif ekonomi Islam serta berfokus pada tingkat kemiskinan masyarakat pada kabupaten/kota di Aceh. Penelitian ini menggunakan unit analisis yaitu kabupaten/kota di Aceh pada tahun 2016-2020. Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti berminat untuk mendalami penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kab/Kota di Aceh)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pengaruh belanja langsung secara parsial terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh?
2. Apakah pengaruh belanja tidak langsung secara parsial terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh?
3. Apakah pengaruh secara simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Lansung secara parsial terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Tidak Lansung secara parsial terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh..

3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal pengaruh Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, guna mendalami ilmu menulis karya ilmiah serta menambah wawasan mengenai pengaruh Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Aceh.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, melalui penelitian ini mampu memberikan sejumlah informasi pengoptimalan potensi lokal yang terdapat di daerah tersebut guna peningkatan kualitas layanan publik untuk pembangunan daerah.
- c. Bagi akademisi, melalui penelitian ini mampu menjadi pedoman referensi serta menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya pada bidang ini.
- d. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini mampu menjadi informasi mengenai pembangunan yang berada di daerah, kemudian masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan dalam berjalannya pemerintahan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memaparkan mengenai latar belakang masalah penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, dikemukakan pula rumusan masalah penelitian ini. Peneliti pun menggambarkan mengenai tujuan dan manfaat yang kemudian dapat dicapai sebagai bentuk hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai konsep yang memiliki kaitan dengan variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen. Peneliti juga melampirkan temuan dari peneliti terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini agar memperkuat penelitian. Kemudian peneliti memaparkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang menjadi patokan dasar dalam melakukan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian tersebut meliputi jenis data, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, metode analisis dan uji hipotesis yang akan di jelaskan pada bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil memaparkan hasil penelitian dengan analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Selain hasil penelitian, bab ini juga memaparkan tentang deskripsi singkat Provinsi Aceh. Serta memaparkan hasil dari pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diakhiri dengan penutup dari pembahasan penelitian, termasuk kesimpulan dan hasil pengujian hipotesis. Bab ini juga memberikan saran yang dapat membantu para pemangku kepentingan.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam ekonomi guna pemenuhan standar hidup masyarakat di suatu tempat atau daerah. Kejadian semacam ini terjadi biasanya karena pendapatan masyarakat yang rendah guna pemenuhan kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, atau pangan serta rendahnya kualitas SDM tersebut. Rendahnya pendapatan kemudian akan berdampak terhadap tingkat kemampuan yang rendah dalam pemenuhan standar hidup contohnya pada standar pendidikan dan standar kesehatan. Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang menjadi masalah dikarenakan tingkat penduduknya tinggi maka dari itu terdapat ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan sosial dalam masyarakat itu sendiri (Teddy Desly Minggu, dkk, 2019).

Kemiskinan merupakan suatu problema yang sulit ditanggulangi oleh pemerintah. Dibandingkan dengan populasi umum, keluarga miskin berkemungkinan lebih terkena tunawisma, kecanduan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan. Keluarga yang lebih miskin lebih cenderung melakukan tindak kriminal serta lebih mungkin menjadi sasaran kriminalitas. Meskipun kemiskinan dan konsekuensinya sukar untuk dipisahkan, kemiskinan kemungkinan besar terkait dengan berbagai penyakit ekonomi dan sosial (Mankiw, Quah dan Wilson, 2012).

Secara umum kemiskinan merupakan kondisi dimana penduduk/keluarga yang tak mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Akan tetapi terdapat beberapa institusi atau pihak telah membuat kriteria dalam menentukan penduduk miskin. Secara garis besar, kemiskinan terjadi dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor internal maupun eksternal (Safitri, A., 2019). Tinggi rendahnya kemiskinan juga dapat diukur tidak hanya berfokus terhadap garis kemiskinan. Teori yang berfokus terhadap garis kemiskinan didefinisikan sebagai kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif merupakan ukuran ketimpangan terhadap pengalokasian pendapatan serta umumnya dapat ditentukan oleh tingkatan pendistribusian rata-rata tersebut.

Sebagai suatu tolak ukur relative, kemiskinan relative dapat dibedakan berdasarkan Negara maupun periode tertentu dalam suatu negara (Tulus T.H Tambunan, 2014). Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial yang sangat penting terhadap pembangunan ekonomi, sehingga masalah rendahnya pembangunan di Indonesia juga diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri (Misdawita & Sari, 2013). Definisi yang relevan mengenai kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan suatu keadaan dimana keadaan penduduk yang tak memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat atau individu itu sendiri. Seperti yang diketahui, kemiskinan dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan budaya. Tiap-tiap kemiskinan tersebut memiliki pengertian serta arti yang berbeda. Kemiskinan absolut mengacu pada kemiskinan yang terjadi pada seseorang jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan. Dapat dikatakan ketidakmungkinan terpenuhinya kebutuhan dasar layaknya sandang, pangan, papan, dan pendidikan, Selain itu, kemiskinan relatif mendefinisikan kemiskinan individu yang berpenghasilan di atas garis

kemiskinan, tapi masih tergolong berpenghasilan kurang dari masyarakat sekitarnya. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Definisi kemiskinan telah berkembang seiring dengan rumitnya faktor penyebab, indikator dan masalah lain yang terlibat. Kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai problematika perekonomian semata, tetapi sudah merambah ke masalah politik, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dinas sosial mengartikan masyarakat miskin sebagai mereka yang tak memiliki pekerjaan serta ketidaksanggupan dalam pemenuhan kebutuhan mendasar yang layak, dan masyarakat telah mencari nafkah akan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak (Fitri, C. D., Safitri, W. D., & Chairunnas, C., 2021).

2.1.2 Kategori Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikategorikan dalam lima kelas kategori, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut tidak hanya didasarkan melalui kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal individu atau masyarakat bagi kehidupan yang layak, tetapi juga dari segi tingkat pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Maka dari itu, tingkat pendapatan minimum adalah penghalang antar kondisi yang disebut kemiskinan, atau biasa dikenal sebagai garis kemiskinan. Individu atau masyarakat dianggap miskin absolut jika penghasilannya di bawah garis kemiskinan dan tak mampu terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya yang dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan serta pendidikan. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang tak terkait atau tidak mengikuti garis kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah tingkat kemiskinan yang derajatnya di bawah, serta ketidaksanggupan memenuhi kebutuhan hidup minimum.

2. Kemiskinan Relatif

Sejumlah individu dikatakan masuk kedalam ketogeri kemiskinan relative jika dalam suatu masyarakat memiliki pendapatan lebih sedikit dari individu lainnya, terlepas dari individu tersebut tergolong kedalam kemiskinan absolut maupun tidak. Dorongan pada kemiskinan relatif menggambarkan terjadinya kesenjangan pendapatan dalam masyarakat, yang juga dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, kesenjangan suatu daerah dengan daerah lainnya dapat diukur dengan Kemiskinan relatif. Ukuran relatif diukur dari segi tingkat pendapatan, ketimpangan SDA, dan SDM dari segi kualitas pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang tidak terkait atau berdasarkan garis kemiskinan. Kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan di mana kebutuhan minimum untuk penghidupan tidak dapat dipenuhi.

3. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural berfokus pada keengganan individu atau kelompok untuk meningkatkan taraf hidup mereka meskipun ada upaya eksternal untuk melakukannya, yang disebabkan oleh faktor budaya. Kemiskinan struktural juga diartikan sebagai kemiskinan antar kelompok masyarakat karena struktur sosial suatu masyarakat tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Kemiskinan struktural termasuk kurangnya perumahan yang sehat, kurangnya pendidikan, dan kurangnya komunikasi dengan dunia di sekitar mereka. Kemiskinan struktural dapat diukur dengan tidak adanya perlindungan oleh kebijakan, hukum, dan pemerintah dari peraturan birokrasi atau pemerintah yang melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk melakukan pemanfaatan terhadap peluang yang ada.

4. Kemiskinan kronis

Kemiskinan kronis diakibatkan oleh banyak faktor, antara lain keadaan budaya dan sosial yang mendorong tingkah laku serta gaya hidup lingkungan yang kurang produktif. Keterbatasan sumber daya dan isolasi (daerah dengan SDA yang signifikan dan daerah terisolasi). Tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, minimnya kesempatan kerja, dan ketidakmampuan masyarakat untuk mengimbangi perekonomian pasar.

5. Kemiskinan sementara

Kemiskinan sementara terjadi akibat pergantian siklus bisnis dari normal yang kemudian menjadi krisis terhadap ekonomi, yang berubah-ubah sesuai musim. Bencana alam maupun suatu hal yang dapat mengakibatkan penurunan taraf kesejahteraan.

2.1.3 Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Menurut Kadji Y (2012) Kemiskinan dapat terjadi melalui beberapa penyebab antara lain sebagai berikut:

1. Kemiskinan tingkat mikro muncul karena ketidaksetaraan dalam cara kita berpikir tentang sumber daya. Hal ini mengakibatkan pengalokasian pendapatan tidak merata. Penduduk miskin hanya bergantung pada sumber daya yang kuantitasnya terbatas dan rendahnya kualitas pada SDA tersebut.
2. Kemiskinan muncul dari perbedaan kualitas SDM yang sangat penting bagi penanggulangan kemiskinan. Bakat berkualitas buruk berarti produktivitas yang ditawarkan juga rendah dan upah yang diperoleh didasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang terbatas.
3. Perbedaan akses modal disebabkan oleh kemiskinan akibat teori “lingkaran setan” kemiskinan.

2.1.4 Pengukuran Kemiskinan

Suatu individu tergolong miskin jika pengeluaran (atau pendapatan) per kapitanya terdapat pada bawah garis kemiskinan. Penghitungan kebutuhan dasar penduduk dengan pendekatan rata-rata pendapatan per kapita merupakan cara penghitungan penduduk miskin yang dilakukan oleh BPS. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS merupakan pengeluaran minimal yang dikeluarkan untuk perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan pangan, guna pemenuhan energi minimum suatu individu per hari yaitu sebesar 2100 kalori. Menurut Haugton dan Khander (2009), Terdapat dua pendekatan dalam mengukur kemiskinan antara lain pendekatan pengeluaran dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang menarik untuk digunakan pada pengukuran tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pengukuran pendapatan menggunakan rumus pendapatan = konsumsi + perubahan kekayaan bersih. Dan juga kemiskinan diukur dengan pengeluaran konsumsi antara lain barang atau jasa yang dibeli serta yang tersedia melalui produksinya. Pada negara maju, konsumsi adalah tolak ukur kesejahteraan seumur hidup yang lebih layak dibandingkan tolak ukur pendapatan.

2.1.5 Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi Islam

Kemiskinan adalah salah satu sebab kemunduran dan kehancuran suatu bangsa. Bahkan Islam memandang kemiskinan merupakan suatu ancaman dari setan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطٰنُ يَعدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ ۗ وَاللّٰهُ يَعدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Ada beberapa tafsiran dari ayat diatas, salahsatunya adalah “(Setan menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat, maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan Allah menjanjikan kepadamu) dengan mengeluarkan nafkah itu (keampunan dari-Nya) terhadap dosa-dosamu (dan karunia), yakni rezeki sebagai penggantinya (dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) orang-orang yang suka mengeluarkan nafkah” (As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. 2003). Islam merupakan ideolodi yang shahih, serta sangat berfokus pada masalah kemiskinan beserta upaya dalam pengentasanya. Dalam istilah fiqih, terdapat pembagian mengenai kemiskinan, yaitu Fakir dan Miskin. Fakir menurut syara’ merupakan individu yang tidak memiliki apa-apa sama sekali, sedangkan menurut syara’ Miskin merupakan individu yang memiliki perkejaan namun tidak memiliki kecukupan harta dalam pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Melalui kedua definisi, dapat dikatakan bahwa Fakir telah tergolong dalam kriteria miskin (Mujahidin, A. 2017). Kedua istilah tersebut sikonsepan dalam suatu istilah yaitu miskin, yang memiliki definisi individual yang tidak memilki kecukupan harta dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya diantaranya sandang, papan dan pangan...

Melalui kedua definisi, dapat dikatakan bahwa Fakir telah tergolong dalam kriteria miskin. Kedua istilah tersebut sikonsepan dalam suatu istilah yaitu miskin, yang memiliki definisi individual yang tidak memilki kecukupan harta dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya diantaranya sandang, papan dan pangan. Kemiskinan adalah suatu problema yang kompleks yang tak dianjurkan, dalam Islam adanya larangan terhadap umatnya untuk tidak meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An Nisa’ ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-nisa : 9).

Beragam tafsiran muncul dari ayat diatas, salah satunya adalah “Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang rnenjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit serta meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya. Sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta” (Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. 2011).

Kemiskinan adalah konsep multidimensi yang sukar untuk didefinisikan secara individual. Banyak ahli dari berbagai bidang yang mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan pada perspektif ekonomi Islam sebenarnya mempunyai interpretasi yang sedikit beda dengan kemiskinan biasa (Siti Humanira, 2013). Dalam Islam kemiskinan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Menurut madzhab syafi“I dan hambali definisi fakir yaitu individu yang tidak berpenghasilan dikarenakan adanya alasan khusus yang syar’i, diantaranya factor umur, dan memiliki kesibukan pendakwahan yang mengakibatkan tidak sempatnya bekerja. Hal tersebut terdapat pada Q.S Al-baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Al Baqarah : 273).

Begitu pula dengan tafsiran dari ayat diatas yang berbunyi “Setelah menjelaskan anjuran untuk berinfak kepada siapa pun yang membutuhkan, ayat ini menjelaskan tentang siapa yang diprioritaskan untuk mendapat bantuan. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yakni yang membutuhkan bantuan karena sudah tua, sakit atau terancam, terutama yang terhalang usahanya karena disibukkan dengan berjihad di jalan Allah, atau mereka terluka atau cedera medan perang, sehingga mereka tidak dapat berusaha untuk memenuhi kehidupan hidup di bumi. Mereka adalah orang-orang yang terhormat dan selalu menjaga kehormatan diri, sehingga orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau hai Muhammad dan siapa saja yang memiliki ketajaman pandangan (*farasah*) mengenal mereka dari ciri-cirinya, yaitu mereka terlihat khusuk, ikhlas, rendah hati, dan sederhana sehingga ketakwannya itu melahirkan kewibawaan di hati dan mata orang yang memandang. Sekiranya mereka terpaksa harus meminta, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain melainkan dengan cara yang sangat halus yang tidak dapat dipahami kecuali oleh orang yang memiliki ketajaman pandangan.

Mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, sehingga apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sedikit atau banyak, secara terang-terangan atau tersembunyi, sungguh, Allah Maha Mengetahui dan akan memberinya balasan yang setimpal” (Tafsir Ringkas Kemenag RI).

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir miskin dipahami sebagai mereka yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetapi masih tidak terpenuhinya segala kebutuhan. Kemiskinan menurut Al Ghazali berupa ketidakmampuan individu untuk pemenuhan kebutuhannya. Tidak mampu merawat hal-hal yang tidak Anda butuhkan bukanlah kemiskinan. Terdapat dua bagian kemiskinan menurut Al-Ghazali diantaranya kemiskinan yang berkenaan dengan material dan kemiskinan berkenaan dengan kebutuhan rohani. Teori ini selaras dengan pendapat bahwa kemiskinan tidak hanya kekurangan kebutuhan dasar, melainkan kekurangan kemiskinan spiritual. Islam merupakan agama yang seimbang, terdiri dari spiritual dan sekuler, yang diklaim memberikan bobot yang sama pada keduanya (Chapra, M.U., 2000).

Menurut teori di atas, jika tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah sebagai tujuan dari *Maqasid* syariah terdiri dari: *dharuriyyah* (utama), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (*tersier*). Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya juga semua secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat *universal* artinya bahwa kemaslahatan itu bermanfaat bukan untuk jangka waktu atau masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu selama kehidupan masih ada (Kasdi & Kudus, 2014).

1. Dahruriyah

Dharuriyyah adalah perwujudan pelaksanaan kemaslahatan agama dan dunia, apabila ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia serta

bahkan akhirat juga akan hilang, kemudian yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyah* ini dimana tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan *primer*. Keperluan dan perlindungan *dharuriyyah* ini dalam buku ushul fiqh, termaksud as-syithibi, membagi menjadi lima perkara (*al-kulliyat al-khams*), yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperuntukkan untuk Agama, Hidup atau jiwa, Keluarga atau keturunan, Harta atau kekayaan, dan Intelek atau akal (Dedi, 2018).

Jika kelima hal di atas dapat diwujudkan, maka akan membawa kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di masa depan, yang disebut *falah* dalam ekonomi Islam. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan berdampak pada suatu manfaat, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam masyarakat. Jika kelima hal ini tidak dilakukan dengan benar, kehidupan tidak akan sempurna atau akan berdampak negatif pada kelangsungan hidup.

2. Hajiyyah

Hajiyyah merupakan tahap kedua dari *maqashid syariah* dimana *hajiyyah* didefinisikan sebagai hal-hal kebutuhan guna mewujudkan kemudahan dan mengurangi kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya serta ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada “dapat ditambahkan” bahaya yang muncul jika *hajiyyah* tidak akan menimpa siapapun, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. *Hajiyyah* ini bisa disebut sebagai kebutuhan-kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.

Hajiyyah terkadang diartikan sebagai suatu keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan

manusia. Maka hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia (Sodiq, 2015).

3. Tahsiniyah

Tahsiniyyah adalah tahap terakhir dari *maqashid as-syariah* dimana *tahsiniyyah* mengandung makna (tersier) yang merupakan semua keperluan dan perlindungan dari segala bentuk yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain, seseorang ketika menginjak keadaan *tahsiniyah* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya.

Meskipun hal ini kemungkinan besar tidak akan menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dari aktivitas manusia. *Tahsiniyah* identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Akbar dan Febriadi, 2018).

2.1.6 Indikator Kemiskinan

Tolak ukur kemiskinan yang sering digunakan berdasarkan ukuran pendapatan serta pengeluaran rata-rata penduduk di wilayah tertentu. Memperluas tolak ukur dapat memasukkan aspek masalah kemiskinan, mengukur jumlah kelompok masyarakat yang menerima manfaat atau program kesehatan serta pendidikan. Terdapat banyak luasan pengukuran lainnya memasukkan dimensi sosiopolitik untuk acuan guna menjelaskan pembentukan kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini disebut Indeks Kemiskinan, tergolong dalam indikator sosial dalam pembangunan. Kemiskinan memiliki beberapa indikator-indikator, yaitu:

1. Indikator Kemiskinan Dalam Ekonomi Konvensional

Dari segi ekonomi, kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dimensi ekonomi kemiskinan didefinisikan menjadi suatu keadaan dimana kurangnya ketersediaan serta pengoptimalan sumber daya yang dapat meningkatkan tingkat kekayaan dan kesejahteraan suatu individu (Suryawati, 2004:123). Berdasarkan definisi tersebut, dimensi ekonomi membagi kemiskinan menjadi dua bagian yang dapat dijadikan sebagai indikator antara lain dimensi pendapatan yang berupa pendapatan per-kapita dan dimensi konsumsi atau pengeluaran yang berupa garis kemiskinan.

a. Pendapatan Per-Kapita

Merupakan besaran rata-rata pendapatan masyarakat dalam sebuah negara selama periode tertentu, dan pendapatan per kapita bersumber dari pendapatan nasional, dapat memperhitungkan total keseluruhan masyarakat dalam satu wilayah yang mempunyai jumlah besaran pendapatan per kapita yang bertambah jika dibandingkan periode-periode sebelumnya (Awalurradhana, A., Zulhilmi, M., & Safitri, W. D., 2021).

b. Garis kemiskinan

Adalah indikator yang mewakili pengeluaran rata-rata per kapita untuk konsumsi dan bukan konsumsi dalam golongan acuan yang sudah ditentukan sebelumnya (BPS, 2004). Definisi mengenai kelompok referensi sebagai kelas populasi marginal adalah yang hidup tepat di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan menurut definisi BPS, didefinisikan dengan dasar konsumsi bagi populasi marginal yang pendapatan dasarnya kurang di atas pendapatan minimum. Pada dasarnya, indikator garis kemiskinan mengukur mampu atau tidaknya masyarakat dalam

pemerolehan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Indikator Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam

Korayem & Mashhour (2014:1) menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kebutuhan hidup manusia di dunia. Mereka menemukan bahwa meskipun ekonomi konvensional dan ekonomi Islam berbeda dalam perkiraan mereka tentang kemiskinan, namun sebagian besar serupa. Kemiskinan dalam konvensional diperkirakan melalui meninjau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara itu, ekonomi Islam memprediksikan kemiskinan dengan tingkat yang layak, dan mereka yang berkehidupan di bawah tingkat yang layak tergolong dalam miskin. Menurut teori di atas, jika tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah. Masalah sebagai tujuan dari *Maqasid* syariah terdiri dari: *dharuriyyah* (utama), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (*tersier*). Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya juga semua secara kolektif dan keseluruhan. Kasdi & Kudus (2014) menyebutkan bahwa bersifat *universal* artinya bahwa kemaslahatan itu bermanfaat bukan untuk jangka waktu atau masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu selama kehidupan masih ada yaitu:

- a *Dharuriyat* adalah perwujudan pelaksanaan kemaslahatan agama dan dunia, apabila ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia serta bahkan akhirat juga akan hilang, kemudian yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyah* ini dimana tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan *primer*. Keperluan dan perlindungan *dharuriyah* ini dalam buku ushul fiqh, termaksud as-syithibi, membagi menjadi lima perkara (*al-kulliyat al-khams*), yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang

diperuntukkan untuk Agama, Hidup atau jiwa, Keluarga atau keturunan, Harta atau kekayaan, dan Intelekt atau akal (Dedi, 2018).

- b *Hajiyat*, didefinisikan guna mempermudah dalam kehidupan, menghilangkan hal yang sulit ataupun menjadikannya sebagai pemeliharaan yang lebih baik dalam lima unsur pokok diatas. *Hajiyyah* terkadang diartikan sebagai suatu keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah *value* kehidupan manusia. Maka hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia (Sodiq, 2015).
- c *Tahsiniyat*, merupakan guna manusia dapat melaksanakan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas. Tidak dikategorikan dalam menghapus maupun mengurangi berbagai kesulitan, akan tetapi sebagai pelengkap, penerang, serta penghias kehidupan manusia. Meskipun hal ini kemungkinan besar tidak akan menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dari aktivitas manusia. *Tahsiniyah* identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Akbar dan Febriadi, 2018).

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Pengertian Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan sejumlah dana (belanja) anggaran yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Belanja tidak langsung didefinisikan dengan biaya yang tidak berhubungan langsung terhadap program atau kegiatan (Haryanto, 2013). Tentang belanja langsung sering kita jumpai pada instansi baik kelembagaan pemerintahan ataupun non pemerintahan atau lebih dikenal dengan perusahaan swasta, pemebelanjaan langsung ini merupakan

program pemebelanjaan yang sudah diatur oleh pihak perusahaan atau lembaga terkait untuk memenuhi semua prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan setiap lembaga.

Secara historis, anggaran lokal telah menjadi alat untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih tinggi daripada pemerintahan yang lebih rendah. Namun pada era reformasi, pemberlakuan UU No 32 dan 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, peran dan fungsi APBD mengalami perubahan bahkan berubah. secara radikal. Melalui reformasi ini diharapkan APBD dapat berperan sebagai alat kebijakan dan pengelolaan bagi pemerintah daerah.

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (P.M.I. Bawimbang dkk, 2021).

2.2.2 Indikator Belanja Langsung

Belanja langsung memiliki beberapa pembagian antara lain adalah :

a. Belanja Pegawai

Berupa anggaran biaya profesional dan biaya lainnya guna mengembangkan kualitas serta keinginan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Berupa belanja guna pengadaan ataupun pembelian barang dengan nilai guna kurang dari satu tahun atau atas penggunaan jasa terhadap pelaksanaan program pemerintah.

c. Belanja Modal

Merupakan biaya untuk pengadaan serta pembelian ataupun pembangunan aset tetap dengan nilai pakai lebih dari satu tahun.

2.3 Belanja Tidak Langsung

2.3.1 Pengertian Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah perkiraan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung adalah belanja dalam menunjang program pemerintahan yang terdiri dari gaji pegawai (pegawai negeri sipil), belanja subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil antar bagian negara, belanja bantuan antar bagian negara, serta belanja diluar dugaan lainnya.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengurus rumah tangganya dengan mengurangi peran pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya (P.M.I. Bawimbang dkk, 2021).

Belanja tidak langsung diarahkan kepada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ketersediaan pelayanan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik. Tujuan utama dalam alokasi belanja tidak langsung adalah kemiskinan yang ada di daerah. Kajian yang meneliti hubungan belanja pemerintah dengan kemiskinan dilakukan oleh Merdekawati dan Budiantara (2013) yang menyatakan bahwa, pengalokasian belanja daerah untuk bantuan sosial berpengaruh positif terhadap penurunan persentase kemiskinan. Hal ini menandakan alokasi belanja daerah untuk bantuan sosial yang dilakukan pemerintah sudah tepat sasaran dan berjalan dengan baik dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Menurut Suryadarma dan Suryahadi (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran barang publik dan swasta akan menurunkan kemiskinan lebih cepat apabila mengandalkan belanja publik.

2.3.2 Indikator Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

a. **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai adalah biaya insentif seperti gaji PNS, tunjangan kesejahteraan, dan penghasilan lainnya, dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. **Belanja Bunga**

Belanja Bunga di anggarkan dengan tujuan pembayaran bunga atas utang kewajiban modal utang dengan dasar kontrak dalam jangka pendek hingga panjang.

c. **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi di anggarkan guna dukungan biaya produksi beberapa organisasi supaya harga jual produk/jasa yang diperoleh mampu

dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah..

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan dalam hibah berupa barang, uang maupun jasa untuk pemerintahan atau pemerintahan daerah yang lain serta kelompok/perorangan masyarakat yang telah ditentukan alokasinya.

e. Bantuan Sosial

Bantuan sosial dianggarkan guna pemberian dukungan berupa uang atau barang untuk masyarakat dengan tujuan guna memberikan manfaat bagi masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bersumber dari pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa maupun pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.

g. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tidak Terduga

Biaya tak terduga adalah biaya untuk aktivitas yang tidak biasa atau tidak mungkin terulang kembali seperti biaya dalam menghadapi bencana alam dan sosial yang tidak terduga. Ini termasuk pendapatan

dari pendapatan surplus di tahun-tahun sebelumnya yang telah diselesaikan.

2.4 Penelitian Terkait

Jouzar farouq ishak melakukan penelitian di tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan”. Pada penelitian ini menyatakan bahwa belanja langsung memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di kab/kota Jawa Barat, namun hal tersebut tidak sejalan dengan belanja tidak langsung yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan di daerah tersebut.

Nurul Masyitah dan Muhammada Nasir melakukan penelitian di tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh”. Hasil kajian menghasilkan jika belanja langsung berdampak signifikan terhadap kemiskinan, selain itu IPM berdampak positif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil Uji-F, perubahan belanja langsung dan upah IPM secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, membelanjakan lebih banyak uang secara langsung untuk APBD menghasilkan SDM yang lebih baik yang dapat mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.

Teddy Desly Minggu, Veckie A, Rumate, dan Debby Ch. Rotinsulu melakukan penelitian di tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja langsung dan tidak langsung berupa suatu desakan yang paling efektif dari pemerintah dalam tujuan meningkatkan perekonomian sampai saat ini. Investasi dapat menjadi titik awal untuk pertumbuhan yang sukses dan berkelanjutan di masa depan. Karena investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan

lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya pengurangan kemiskinan.

Ria Afrida, Umaruddin Usman, dan Tarmizi Abbas melakukan penelitian di tahun 2021 berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa secara parsial bahwa belanja tidak langsung berpengaruh negative terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Secara bersamaan, Populasi dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Pengaruh penduduk dan pengeluaran tidak langsung kemiskinan sebesar 94,23%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain variabel sebesar 5,77% di luar model ini.

Patricia, Ita, dan Hanly melakukan penelitian di tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kota Manado”. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara parsial belanja langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Begitu pula belanja tidak langsung yang signifikan terhadap kemiskina di Kota Manado. Dana Alokasi Umum secara statistik tidak berdampak signifikan terhadap terhadap kemiskinan di kota Manado. Di sisi lain, studi paralel menemukan bahwa belanja langsung, belanja tidak langsung (BTL) dan dana alokasi umum (DAU) memiliki dampak bersama yang besar terhadap kemiskinan di Kota Manado.

Kaat, M. H., & Rotinsulu, D. C. melakukan penelitian pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015. Penelitian data belanja langsung, belanja tidak langsung dan angka kemiskinn. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur, yang

mengidentifikasi pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel endogen dan eksogen. Penelitian ini memperoleh hasil pertama menunjukkan belanja langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, belanja tidak langsung memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Rahmawati, S. melakukan penelitian pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2004-2016”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan melalui PDRB. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya, belanja modal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap angka kemiskinan.

Sinaga, I. D. melakukan penelitian pada tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak IPM, Pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terhadap kemiskinan. Kajian dari penelitian ini memperlihatkan bahwa IPM memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun hasil dari pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap angka kemiskinan yang ada di Provinsi Papua.

Elilia, L. N. melakukan penelitian pada tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat besaran pengaruh investasi baik domestic maupun asing terhadap pengurangan angka

kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi domestik dan asing terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini dengan menggunakan pengujian hipotesis dengan uji-t menunjukkan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 penanaman modal dalam negeri memiliki pengaruh signifikan serta positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur, sedangkan penanaman modal asing memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan. Tingkat kemiskinan Angka kemiskinan pada tahun 2012 adalah -2019. Selain itu, diketahui dari uji F bahwa antara tahun 2012 dan 2019, investasi domestik dan investasi asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan..

Untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan (Jouzar farouq ishak, 2017)	Teknik dalam pengambilan sampel adalah <i>purposive samplin</i> .	Hasil penelitian menyatakan bahwa belanja langsung mmeiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di kab/kota di Provinsi Jawa Barat, namun hal tersebut tidak sejalan dengan belanja tidak langsung yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan.
2	Pengaruh Belanja Langsung dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh (Nurul Masyitah dan Muhammadiyah Nasir, 2018)	Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Menunjukkan bahwa BL berdampak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM berdampak positif signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil Uji-F, perubahan belanja langsung dan upah IPM secara bersamaan berdampak signifikan terhadap kemiskinan
3	Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung (Teddy Desly Minggu, Veckie A, Rumat, dan Debby Ch. Rotinsulu, 2019)	Teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa belanja langsung dan tidak langsung berupa suatu desakan yang paling efektif dari pemerintah dalam tujuan meningkatkan perekonomian sampai saat ini

No	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur (Ria Afrida, Umaruddin Usman, dan Tarmizi Abbas, 2021)	Menggunakan data sekunder selama tahun 2006-2019. Model yang digunakan adalah linier berganda regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial populasi dan pengeluaran tidak berpengaruh negatif langsung dan signifikan terhadap kemiskinan
5	Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikota Manado (Patricia M. I. Bawimbang, Ita Pingkan Rorong, dan Hanly F Dj Siwu (2021)	Menggunakan data sekunder selama tahun 2004-2018. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda	Disimpulkan bahwa secara parsial BL memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Begitu pula BTL yang signifikan terhadap kemiskina. DAU secara statistik tidak berdampak signifikan terhadap terhadap kemiskinan. Di sisi lain, studi paralel menemukan bahwa BL, BTL dan DAU memiliki dampak bersama yang besar terhadap kemiskinan
6	Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015 (Kaat, M. H., & Rotinsulu, D. C., 2019)	Data yang digunakan dalam penelitian ini : data sekunder yang berupa data belanja langsung, belanja tidak langsung, PDRB dan angka kemiskinan	Hasil penelitian ini pertama memperoleh hasil BL tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua, BTL memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan

No	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2004-2016 (Rahmawati, S., 2018)	Menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, Belanja Modal, dan Kemiskinan	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Selanjutnya, belanja modal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap angka kemiskinan
8	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019 (Sinaga, I. D., 2020)	Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari BPS	Kajian dari penelitian ini memperlihatkan bahwa IPM memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun hasil dari pertumbuhan ekonomi serta pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap angka kemiskinan
9	Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019 (Elilia, L. N., 2021)	Menggunakan data sekunder, diolah melalui uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi	Penelitian melalui uji t menunjukkan Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan, Penanaman Modal Asing berpengaruh positif signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. Pada uji F diketahui bahwa secara bersamaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber: Data diolah (2022)

2.5 Kerangka Berfikir

2.5.1 Keterkaitan Antara Belanja Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Belanja langsung merupakan belanja atau pengeluaran yang berkaitan secara langsung terhadap pelaksanaan suatu kegiatan (program) dari pemerintah pusat. Belanja langsung mempunyai peranan penting terhadap mampunya daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan program pemerintahan di daerah. Pengalokasian belanja langsung oleh pemerintah Aceh berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dengan mengalokasikan anggaran pada isu-isu produktif seperti anggaran pembangunan dan anggaran infrastruktur. Pembangunan dan infrastruktur lokal yang lebih baik dapat menarik investor baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Demikian halnya dengan ekonomi Islam. Tingkat menurunnya kemiskinan memiliki keterkaitan dengan terpenuhinya dan terpeliharanya kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafsi*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*). Belanja langsung dari pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang memberikan manfaat serta memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kelima unsur tersebut sehingga terpenuhinya tingkat dharuriyat dalam maqashid syariah.

Belanja langsung mempunyai pengaruh positif yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi yang diteliti oleh Jory, Josep, dan Krest (2020). Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Tujuan

utama dari ekonomi Islam ialah kesejahteraan dalam mencapai *Falah*. Terwujudnya kesejahteraan menurut Islam dalam hal ini harus terpenuhinya fasilitas umum yang dapat membantu masyarakatnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari.

Sejumlah peneliti lainnya juga menemukan bukti kuat bahwa belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Teddy, Veckie, Rimate, dan Debby (2019) di kota Bitung, yang menyimpulkan bahwa belanja langsung sejauh ini merupakan cara intervensi negara yang paling efektif dalam perekonomian. Investasi dapat dijadikan sebagai titik awal untuk keberhasilan serta keberlanjutan pembangunan pada masa yang akan datang. Dikarenakan investasi dapat membuka lapangan kerja baru. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pendapatan pada masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Bertolak belakang dengan penelitian di atas yang menjelaskan bahwa belanja langsung dapat menekan tingkat kemiskinan, penelitian yang dilakukan Patricia, Ita, dan Hanly (2021) malah menemukan bukti bahwa Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap angka Kemiskinan di kota.

2.5.2 Keterkaitan Antara Belanja Tidak Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Belanja tidak langsung merupakan belanja atau pengeluaran yang tak memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pelaksanaan suatu kegiatan (program) dari pemerintah pusat. Belanja ini cenderung menasar pada pelayanan-pelayanan dasar seperti kesehatan, ketersediaan pelayanan public, dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan perkotaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah belanja tidak langsung. Lebih banyak uang untuk dibelanjakan memenuhi kebutuhan dasar

dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kekayaan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, menurunkan tingkat kemiskinan. Ketentuan ekonomi Islam yang bahwa karakteristik dalam ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan, bertanggung jawab, mencukupi dan realistis dan tidak lupa pula harus sejalan dengan Al-Quran dan Hadis.

Tingkat kemiskinan dalam ekonomi Islam dapat dilihat melalui terpenuhinya dan terpeliharanya maqashid syariah yaitu *dharuriyat*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Dalam konteks kemiskinan dharuriyah menjadi acuan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang mana diantaranya harus memenuhi lima unsur pokok antara lain *al-dien* (agama), *an-nafsi* (hidup atau jiwa), *an-nasl* (keluarga atau keturunan), *al-maal* (harta atau kekayaan), *al-aql* (intelektual atau akal). Belanja tidak langsung yang pemerintah lakukan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kelima unsur tersebut yaitu melalui belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan sebagainya.

Tujuan pengalokasian belanja tidak langsung adalah untuk peningkatan tingkat kesejahteraan rakyat ataupun pengentasan kemiskinan. Belanja tidak langsung berupa pengeluaran untuk pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial berdampak besar terhadap pengentasan kemiskinan, seperti dalam kajian Rizki Syamsuri TN dan Agus Bandiyono (2018), arah yang dihasilkan adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pada ketiganya akan menurunkan indeks kemiskinan.. Sejumlah peneliti lainnya juga menemukan bukti kuat jika belanja tidak langsung memiliki dampak positif terhadap kemiskinan (Jouzar farouq ishah 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Patricia, Ita, dan Hanly (2021) yang menyatakan bahwa belanja tidak

langsung berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Kota Manado.

2.5.3 Keterkaitan Antara Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dengan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

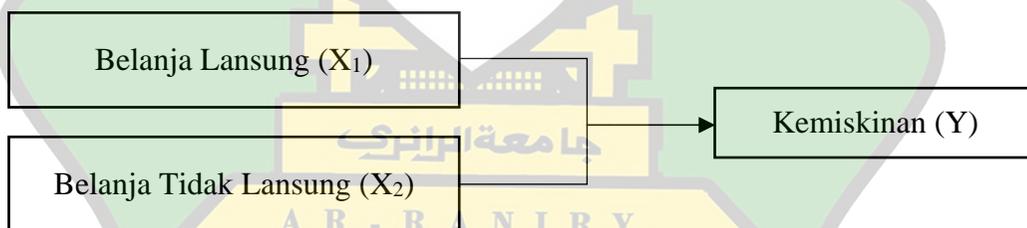
Jika ternyata Belanja Langsung berpengaruh pada kemiskinan, maka terdapat kemungkinan kuat bahwa Belanja Tidak Langsung juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Seperti yang diketahui pemanfaatan Belanja Pemerintah berorientasi tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi berorientasi juga menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta ketidakmampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jenis belanja pemerintah yang dapat diidentifikasi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan diantaranya adalah pengeluaran untuk Belanja Langsung serta Belanja Tidak Langsung.

Belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Pemenuhan lima unsur utama dalam maqashid syariah yang diantaranya agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafsi*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*) dapat menurunkan tingkat kemiskinan, Jika hal tersebut bisa diterapkan, kemudian berdampak kepada mulianya kehidupan serta kesejahteraan bagi dunia maupun masa depan, dan biasa dikenal dengan istilah *falah* pada ekonomi Islam. Kelima hal diatas adalah kebutuhan dasar yang wajib terpenuhi oleh semua manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat mempengaruhi utilitas. Jika tidak melakukan lima hal ini dengan benar, hidup akan kurang sempurna atau kelangsungan hidup akan terpengaruh.

Namun tidak semua hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang lain. Seperti penelitian di atas yang menjelaskan bahwa belanja langsung dapat menekan tingkat kemiskinan, penelitian yang dilakukan Patricia, Ita, dan Hanly (2021) malah menemukan bukti bahwa Belanja Langsung tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap angka Kemiskinan di kota.

Ketentuan ekonomi Islam yang bahwa karakteristik dalam ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan, bertanggung jawab, mencukupi dan realistis dan tidak lupa pula harus sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Terpenuhinya Karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam mencerminkan keberhasilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala aspek secara merata sehingga angka kemiskinan juga ikut menurun. Dikarenakan tujuan utama dari ekonomi Islam ialah kesejahteraan dalam mencapai *Falah*. Kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir

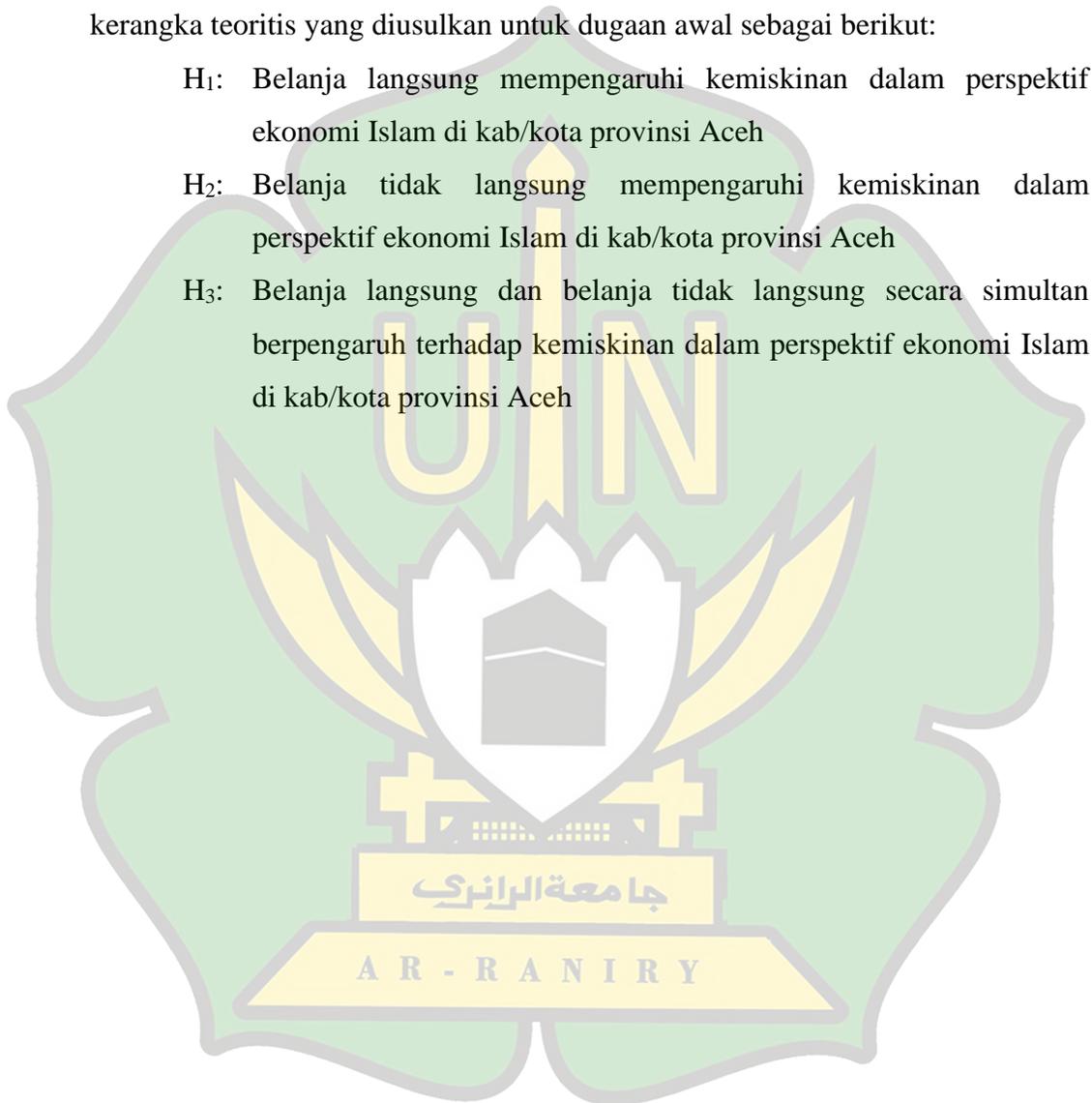


Sumber: Data diolah (2022)

2.6 Hipotesis

Hipotesis ditafsirkan sebagai jawaban sementara. Karena kebenarannya belum teruji, dan kebenarannya belum teruji dengan data lapangan. Berdasarkan kerangka teoritis yang diusulkan untuk dugaan awal sebagai berikut:

- H₁: Belanja langsung mempengaruhi kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh
- H₂: Belanja tidak langsung mempengaruhi kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh
- H₃: Belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam di kab/kota provinsi Aceh



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasional, digunakan guna melihat/mencari pengaruh antar variable bebas yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan yang bersifat kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, selanjutnya penggunaannya untuk penelitian terhadap populasi serta sampel tertentu, dan pengumpulan data akan menggunakan instrument penelitian, kemudian analisis data yang memiliki sifat statistik, bertujuan guna menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif yang menyajikan data dalam bentuk angka, diawali dari pengumpulan data, interpretasi data, dan pengungkapan hasil penelitian dalam angka (Sugiyono, 2018).

3.2 Sumber Data

Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan kemudian disatukan dengan studi-studi terdahulu atau yang diterbitkan instansi lain, sumbernya biasanya tidak langsung berupa data arsip-arsip dan dokumentasi resmi (Situmorang, 2010). Maka data sekunder pada penelitian ini berupa data yang meliputi data keuangan realisasi Anggaran Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung. Data merupakan fakta serta angka yang relative tidak berarti, dan data kemudian akan diubah menjadi informasi yang berarti terhadap pengguna. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dalam angka tahun 2016-2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumen. Bentuk dari teknik pendokumentasian yang merekam peristiwa masa lalu seperti menulis, menggambar, atau monumen seseorang (Sugiyono, 2010). Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dan kemiskinan di Aceh.

Menurut (Dedi, 2011), Data panel adalah tipe data yang terdiri dari variabel yang dikumpulkan dalam deret waktu selama periode waktu tertentu untuk rentang individu atau kategori. Model yang digunakan untuk memodelkan data ini adalah model data panel dan model deret waktu multivariat. Sejalan dengan itu, tipe data juga dikenal vertikal di mana frekuensi data tidak perlu berjarak sama, tetapi analisis statistik yang dilakukan pada model vertikal memerlukan tujuan yang berbeda.

3.4 Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Variable dependen

Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa variable dependen merupakan variable yang dipengaruhi atau akibat dikarenakan adanya variable bebas. Variable terikat merupakan variable yang dijadikan sebagai perhatian utama dalam suatu pengamatan. Pengamatan tersebut kemudian dapat menjelaskan variable didalam variable dependen dan perubahannya yang terjadi kemudian (Kuncoro, 2013).

Variabel dependen pada penelitian ini merupakan Kemiskinan (Y). Kemiskinan yang dimaksudkan pada hal ini merupakan tingkat kemiskinan Kab/Kota di Aceh didasarkan dengan rasio penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk dihitung menggunakan satuan persen (%).

Indikator-indikator kemiskinan diantaranya adalah:

- a. Pendapatan Per Kapita
- b. Garis kemiskinan

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen dan selanjutnya memiliki hubungan positif atau negatif dengan variabel dependen (Kuncoro, 2013).

Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu Belanja Langsung (X_1) dan Belanja Tidak Langsung (X_2). Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang dimaksud disini adalah didasarkan dengan rasio jumlah total yang dianggarkan oleh pemerintah dengan total penduduk dihitung dengan menggunakan satuan rupiah (Rp) perkapita.

Untuk memudahkan dalam melihat operasional variabel dalam penelitian ini maka dapat di lihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi
1	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah
2	Belanja Langsung (X_1)	Belanja langsung merupakan sejumlah dana (belanja) anggaran yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
3	Belanja Tidak Langsung (X_2)	Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan

Sumber: Data diolah (2022)

3.5 Metode analisis data

Analisis data adalah proses dalam menata data secara teratur sesuai dengan kategori, pola dan satuan dasar agar kemudian dapat dilakukan perumusan hipotesis kerja dari sebuah penelitian. Penganalisaan data menggunakan analisis regresi data panel (*pooled data*). Data panel adalah data yang termasuk dalam data seksi silang (beberapa variabel) dan data runtut waktu (berdasar waktu) (Winarno, 2011). Data panel pada penelitian ini terdiri dari data *time series* (runtut waktu) selama periode tahun 2016-2020 ($n = 5$) dan data kerat silang (*cross section data*) yang diambil dari 23 Kab/Kota di provinsi Aceh.

Model dengan data cross section :

$$Y_i : \alpha + \beta X_i + \epsilon_i ; i = 1,2,\dots,N \quad (3.1)$$

N : Banyaknya data cross section

Model dengan data time series :

$$Y_t : \alpha + \beta X_t + \epsilon_t ; t = 1,2,\dots,T \quad (3.2)$$

T : Banyaknya data time series

Melihat data panel merupakan gabungan antara data *cross section* dengan data *time series* oleh karena itu model dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} : \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it} ; i = 1,2,\dots,N; t = 1,2,\dots,T \quad (3.3)$$

Keterangan :

N : Banyaknya data cross section

T : Banyaknya data time series

N X T : Banyaknya data panel (Baltagi, 2008: 11).

Pada penelitian ini, belanja modal diukur dengan menggunakan natural log (Ln) belanja modal. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Maka model persamaan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan } LKM_{it} = \alpha + \beta_1 LNBL_{it} + \beta_2 LNBTL_{it} + e_{it} \quad (3.4)$$

Dimana:

LKM_{it} : Laju tingkat Kemiskinan daerah i pada periode t

$LNBL_{it}$: Belanja Langsung di daerah i pada periode t

$LNBTL_{it}$: Belanja Tidak Langsung di daerah i pada periode t

β_1 dan β_2 : Koefisien regresi $LNBL_{it}$ $LNBTL_{it}$

i : Kabupaten/Kota (1, 2, ..., 23)

t : Tahun (2016-2020)

e : *Error term*

3.5.1 Estimasi model regresi

Metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain pendekatan model *Common Effect*, *Fixed Effect* Dan *Random Effect* (Widarjono, 2009:30).

1. Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (*Common Effect*)

Estimasi *Common Effect* merupakan teknik dimana i menunjukkan subjek (*cross section*) dan t menunjukkan periode waktu (Gujarati, 2012:28-31). Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro et al., 2012).

2. Slope Konstan tetapi Intersep Berbeda Antar Individu (*Fixed Effect*)

Model regresi *Fixed Effect* merupakan model dengan *intercept* berbeda untuk tiap-tiap subjek (*cross section*), namun *slope* tiap-tiap subjek tidak mengalami perubahan seiring waktu (Gujarati, 2012:28-31). Model *Fixed Effect* Metode penilaian data panel yang menggunakan variabel dummy guna mengidentifikasi perbedaan *intercept*. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan

terdapat perbedaan *intercept* antar individu namun *intercept* sama antar waktu (*time invariant*). Selanjutnya, model ini juga memperkirakan bahwa koefisien regresi (*slope*) tetap antar perusahaan dari waktu ke waktu.

3. Estimasi Dengan Pendekatan Efek Random (*Random Effects*)

Memasukkan variabel dummy pada model Fixed Effect membawa konsekuensi mengurangi derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang kemudian mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal dengan metode *random effects*. Namun, ketika menganalisis menggunakan efek random, ada satu syarat bahwa objek data silang yang digunakan harus lebih besar dari jumlah koefisien.

3.5.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini terdapat uji yang dilakukan Untuk menentukan teknik evaluasi data panel yang paling tepat untuk memilih manakah model yang terbaik, yaitu :

1. Uji statistic F (*Uji Chow*)

Uji ini dilakukan untuk memilih antara *Pooled least Square* atau *fixed effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel. Hipotesis pada pengujian ini adalah:

H_0 : *Pooled Least Square*

H_1 : *Fixed Effect Model*

H_0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya diterima jika P-value $>$ nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

2. Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk perbandingan antara model *fixed effect* dan *random effect* guna memilih model yang paling efektif untuk di aplikasikan pada regresi data panel (Gujarati, 2012:28-31). Uji Hausman memakai program yang

sama dengan *Chow test* yaitu aplikasi *Eviews*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Hausman test* merupakan sebagai berikut:

H0 : Model *Random Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*

H0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

3. Uji *lagrange multiple (LM)*

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Pooled Least Square*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degrre of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

H0 : *Pooled Least Square*

H1 : *Random Effect Model*

H0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Selain menggunakan ketiga model diatas, dalam memilih model regresi data panel dapat dilakukan dengan memilih pendekatan sebagai alat estimasi yang paling tepat untuk di gunakan didasarkan pada perbandingan gambar residual yang dihasilkan dengan fluktuasi garis fitted oleh ketiga model estimasi model regresi (Amri, 2021).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi statistik yang harus dilakukan pada metode analisis regresi berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen baik secara parsial maupun simultan (Ghozali & Ratmono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pengujian model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang memiliki nilai residualnya terdistribusi secara normal. Cara mengidentifikasi apakah residual memiliki data yang terdistribusi normal atau tidak normal yaitu dengan cara menganalisis grafik dan uji statistik. Pengujian normalitas yang di gunakan adalah uji *Jarque-Bera* (Ghozali & Ratmono, 2017:165)

Hipotesis :

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data berdistribusi tidak normal

Statistik Pengujian dengan Uji Jarque-Bera (JB) 5%. H0 ditolak jika $JB < 0,05$. Sebaliknya, H1 diterima jika $JB > 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, dengan cara melihat atau tidaknya pengaruh linear antar variabel. Uji multikoliniearitas yang terdapat pada model regresi data panel dilakukan dengan perbandingan antara nilai adjusted-R2 dengan nilai koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Multikolinearitas terjadi apabila nilai korelasi di atas 0,90 dan apabila nilai korelasi di bawah 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:103).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ketidaksamaan varian nilai residuan satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam regresi. Uji Heteroskedastisitas dilakukan melalui uji Glejser dengan kriteria nilai *probabilitas* $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, namu apabila nilai

probabilitas $> 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali & Ratmono, 2017:108).

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji Statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan syarat menganggap bahwa variabel lainnya konstan (Ghozali & Ratmono, 2017:62). Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau $\alpha = 5\%$ dengan kriteria sebagai berikut:

1. H_0 ditolak, H_a diterima apabila nilai signifikan $< 0,05$ berarti variabel independen secara parsial atau individu berpengaruh terhadap variabel dependen
2. H_0 diterima, H_a ditolak yaitu apabila nilai signifikan $> 0,05$ berarti variabel independen secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Hipotesis Secara Simultan atau Bersama-sama (Uji Statistic F)

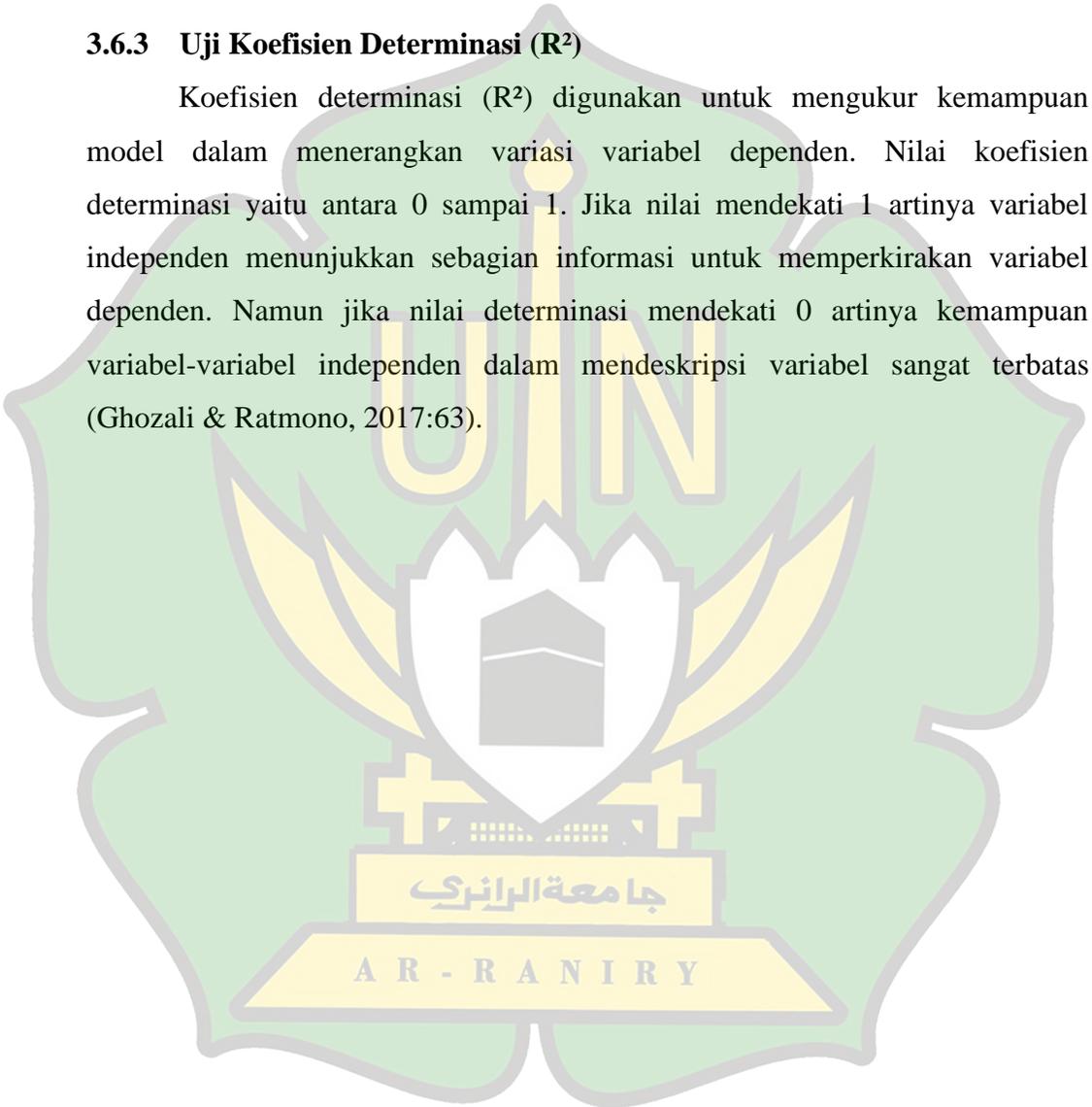
Ghozali dan Ratmono (2017:62) mengutarakan bahwa Uji statistik memperlihatkan apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F Tabel pada signifikan 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian ini sebagai berikut:

1. Jika $\text{Sig } F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika Sig F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 sampai 1. Jika nilai mendekati 1 artinya variabel independen menunjukkan sebagian informasi untuk memperkirakan variabel dependen. Namun jika nilai determinasi mendekati 0 artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam mendeskripsi variabel sangat terbatas (Ghozali & Ratmono, 2017:63).



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Aceh

4.1.1 Geografi

Secara geografi Provinsi Aceh berada pada 2° - 6° lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur di ujung barat laut Sumatera dan dikelilingi oleh Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan dan Samudra Hindia di sebelah barat. Terletak di utara dan timur Selat Malaka, Aceh terletak secara strategis menghubungkan dunia Timur dan Barat sebagai pintu gerbang perdagangan dalam dan luar negeri.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh



Sumber : Data diolah 2022

Aceh memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar, dua danau dan rata-rata ketinggian 125 meter di atas permukaan laut. Aceh meliputi wilayah seluas 72.034,87 km² dan sebagian besar terdiri dari daratan, kepulauan, dan laut. Luas daratan Aceh seluas 56.771 km² (12,26 persen wilayah Sumatera). Daratan terluas yaitu hutan merupakan daratan terluas, meliputi 22.703 km² (39,99%) dari luas wilayah Aceh, disusul perkebunan dengan luas 14.505 km² (25,55%), luas lahan pertanian 9.225 km² (16,25%), perairan darat seluas 2.066 km² (3,64%), pertambangan seluas 1.800 km² (3,17), pemukiman seluas 1.527 km² (2,69%), lahan industri seluas 23 km² (0,04%) dan lainnya seluas 4.922 km² (8,67%) (Badan Pusat Statistik Aceh, 2016).

4.1.2 Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pembagian administrasi pemerintahan dapat memudahkan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Pembagian wilayah administrasi Provinsi Aceh berjenjang mulai dari Kabupaten atau Kota, Kecamatan, Mukim, dan Gampong (Badan Pusat Statistik, 2020).

Daerah administrasi Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota. Berikut Tabel daerah administrasi Provinsi Aceh.

Tabel 4.1
Daerah Administrasi Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Mukim	Gampong
1	Simeulu	Sinabang	10	29	138
2	Aceh Singkil	Singkil	11	16	116
3	Aceh Selatan	Tapaktuan	18	43	260
4	Aceh Tenggara	Kuta Cane	16	51	385
5	Aceh Timur	Idi Rayek	24	53	513
6	Aceh Tengah	Takengon	14	20	295
7	Aceh Barat	Meulaboh	12	22	322
8	Aceh Besar	Jantho	23	68	604
9	Pidie	Sigli	23	94	727
10	Bireuen	Bireuen	17	75	609

Tabel 4.1 - Lanjutan

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Mukim	Gampong
11	Aceh Utara	Lhoksukon	27	67	852
12	Aceh Barat Daya	Blang Pidie	9	20	132
13	Gayo Lues	Blang Kejeren	11	25	136
14	Aceh Tamiang	Kuala Simpang	12	27	213
15	Nagan Raya	Suka Makmue	10	30	222
16	Aceh Jaya	Calang	9	21	172
17	Bener Meriah	Simpang Tiga	10	27	232
18	Pidie Jaya	Meureudu	8	34	222
19	Banda Aceh	Banda Aceh	9	17	90
20	Sabang	Sabang	2	7	18
21	Langsa	Langsa	5	6	66
22	Lhokseumawe	Lhokseumawe	4	9	68
23	Subulussalam	Subulussalam	5	8	82

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh (Data Diolah, 2021)

4.1.3 Agama dan Budaya Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memiliki adat istiadat yang sangat kental dalam bidang Agama, Sosial dan budaya. Hal tersebut menjadi identitas bagi masyarakat aceh.

1. Agama

Penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh mengacu pada Alquran dan hadis yang rinciannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak keistimewaan Provinsi Aceh. UU Otonomi Khusus Provinsi Aceh No. 18 Tahun 2001 dan UUD No. 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh dan secara teknis akan diatur dalam Qanun Aceh. Sejak awal kemerdekaan, masyarakat Aceh telah memperjuangkan Syariat Islam menjadi sumber nilai formal dan resmi serta sumber kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada kehidupan pribadi pemerintahan ataupun pada pelaksanaan pemerintahan. Dalam peribahasa Aceh dikatakan keterkaitan syari'at dan adat sama dengan kaitan antara benda dan sifatnya: hukom ngoen adat lage zat ngoen sifeut. Bermakna, hukum syari'at dan adat di Aceh terintegrasi sangat erat dalam setiap aspek dan artikulasi kehidupan.

Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh, Aceh berhak menerapkan Syariat Islam secara luas pada segala aspek dalam kehidupan maupun pemerintahan. Pemerintah Aceh berhak merumuskan serta penerapan hukum materiil tentang harta benda perdata, kekerabatan perdata, serta hukum acara perdata dan pidana berdasarkan syariat Islam melalui penerapannya Qanun di Provinsi Aceh. Demikian pula putusan sanksi terhadap tindak pidana dalam Qanun Aceh dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak dibatasi oleh undang-undang yang ada.

2. Budaya

Budaya Aceh sangat kaya akan nilai agama Islam, akan tetapi terdapat sebagian golongan penduduk yang di pengaruhi dari kepercayaan leluhur, seperti adat istiadat antara lain: kenduri glee, kenduri tulak bala, kenduri laot, kenduri blang dan sebagainya. Pemerintah Aceh terkait dengan pencarian, pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan adat serta budaya Aceh sejalan dengan regulasi pemerintahan mengenai kepatuhan Syariah Islam, telah melakukan pembentukan Majelis Adat Aceh (MAA). dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004.

4.2 Analisa Deskriptif

4.2.1 Analisa Deskriptif Kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang terhadap ekonomi guna pemenuhan standar hidup masyarakat di suatu tempat atau daerah. Kejadian semacam ini terjadi biasanya karena pendapatan masyarakat yang rendah guna pemenuhan kebutuhan pokoknya seperti sandang, papan, atau pangan serta kualitas SDM tersebut rendah. Rendahnya pendapatan kemudian akan berdampak terhadap tingkat kemampuan yang rendah dalam pemenuhan standar hidup contohnya pada standar pendidikan dan standar kesehatan. Kemiskinan yang terjadi di negara berkembang menjadi masalah dikarenakan

tingkat penduduknya tinggi maka dari itu terdapat ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan sosial dalam masyarakat itu sendiri (Teddy Desly Minggu, dkk, 2019). Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang dihadapkan dengan masalah kemiskinan, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia tergolong cukup rendah. Belakangan tahun terkahir, kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia mulai pulih. Jumlah masyarakat miskin di Indonesia diambil dari data digital masing-masing kabupaten/kota.

Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota adalah daerah otonom dan bagian dalam daerah otonomi. Akan tetapi, tingginya angka kemiskinan Provinsi Aceh tersebar pada semua Kabupaten/Kota. Tingkat kemiskinan 23 Kabupaten/Kota yang terdapat di kawasan hukum Provinsi Aceh dan menjadi variabel dependen pada penelitian ini tersajikan pada Tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	19.93%	20.20%	19.78%	18.99%	18.49%
Aceh Singkil	21.60%	22.11%	21.25%	20.78%	20.20%
Aceh Selatan	13.48%	14.07%	14.01%	13.09%	12.87%
Aceh Tenggara	14.46%	14.86%	14.29%	13.43%	13.21%
Aceh Timur	15.06%	15.25%	14.49%	14.47%	14.08%
Aceh Tengah	16.64%	16.84%	15.58%	15.50%	15.08%
Aceh Barat	20.38%	20.28%	19.31%	19.31%	18.34%
Aceh Besar	15.55%	15.41%	14.47%	13.92%	13.84%
Pidie	21.25%	21.43%	20.47%	19.46%	19.23%
Bireuen	15.95%	15.87%	14.31%	13.56%	13.06%

Tabel 4.2 -Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh Utara	19.46%	19.78%	18.27%	17.39%	17.02%
Aceh Barat Daya	18.03%	18.31%	17.10%	16.26%	15.93%
Gayo Lues	21.86%	21.97%	20.70%	19.87%	19.32%
Aceh Tamiang	14.51%	14.69%	14.21%	13.38%	13.08%
Nagan Raya	19.25%	19.34%	18.97%	17.97%	17.70%
Aceh Jaya	15.01%	14.85%	14.16%	13.36%	12.87%
Bener Meriah	21.43%	21.14%	20.13%	19.30%	18.89%
Pidie Jaya	21.18%	21.82%	20.17%	19.31%	19.19%
Banda Aceh	7.41%	7.44%	7.25%	7.22%	6.90%
Sabang	17.33%	17.66%	16.31%	15.60%	14.94%
Langsa	11.09%	11.24%	10.79%	10.57%	10.44%
Lhokseumawe	11.98%	12.32%	11.81%	11.18%	10.80%
Subulussalam	19.57%	19.71%	18.51%	17.95%	17.60%

Sumber : Data diolah 2022

Tabel menunjukkan data jumlah masyarakat miskin per kabupaten/kota pada Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Kabupaten dengan angka kemiskinan terendah adalah Banda Aceh berjumlah sebesar 7,41% pada tahun 2016 dan menjadi 6,9% pada tahun 2020. Sedangkan Aceh Utara memiliki angka kemiskinan sebesar 19,46% pada tahun 2016 dan sebesar 17,02% pada tahun 2020.

4.2.2 Analisa Deskriptif Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan sejumlah dana (belanja) anggaran yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain: belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal. Belanja tidak langsung

didefinisikan dengan biaya yang tidak berhubungan langsung terhadap program atau kegiatan (Haryanto, 2013). Tentang belanja langsung sering kita jumpai pada instansi baik kelembagaan pemerintahan ataupun non pemerintahan atau lebih dikenal dengan perusahaan swasta, pemebelanjaan langsung ini merupakan program pemebelanjaan yang sudah diatur oleh pihak perusahaan atau lembaga terkait untuk memenuhi semua prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan setiap lembaga.

Tabel 4.3

Anggaran Belanja Langsung Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Belanja Langsung (Per Kapita)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	4,139,415	5,844,131	4,638,987	5,922,469	4,024,470
Aceh Singkil	4,718,547	4,059,336	2,852,458	3,678,858	3,364,582
Aceh Selatan	3,049,938	3,118,938	2,250,218	2,708,784	2,290,757
Aceh Tenggara	3,066,988	3,320,542	1,838,083	2,724,174	2,558,098
Aceh Timur	1,816,144	2,067,427	1,212,909	1,928,770	1,456,807
Aceh Tengah	3,953,366	3,166,400	2,408,048	2,927,753	2,547,465
Aceh Barat	2,873,232	3,029,670	2,392,279	2,829,668	2,558,167
Aceh Besar	1,639,872	1,532,672	1,486,429	1,591,074	1,496,628
Pidie	1,713,332	1,787,198	1,607,151	1,954,959	1,358,247
Bireuen	1,459,776	1,850,387	1,232,657	1,450,083	1,230,737
Aceh Utara	1,401,463	1,342,668	1,115,687	1,596,010	1,332,356
Aceh Barat Daya	4,219,870	3,111,456	2,433,783	3,484,404	3,205,013
Gayo Lues	7,569,430	6,069,718	4,409,516	5,815,940	4,642,062
Aceh Tamiang	2,283,259	2,308,062	1,821,430	2,298,287	1,708,754
Nagan Raya	3,855,710	3,606,667	2,639,179	3,362,822	3,237,369

Tabel 4.3 -Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh Jaya	6,432,300	5,991,096	3,612,261	4,433,859	4,164,206
Bener Meriah	3,450,247	3,522,585	2,607,764	3,280,985	2,838,910
Pidie Jaya	3,381,179	3,127,814	2,816,416	3,085,073	3,135,639
Banda Aceh	2,501,510	2,476,252	2,221,749	2,111,860	2,478,249
Sabang	10,175,629	7,973,100	9,439,993	11,175,948	9,577,942
Langsa	3,261,977	3,469,756	2,183,538	2,842,810	2,409,010
Lhokseumawe	2,121,510	2,265,052	1,847,120	2,226,089	1,870,568
Subulussalam	6,770,134	5,510,829	3,595,712	5,216,355	4,971,113

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.3 di atas memperlihatkan jika belanja langsung mengalami perubahan di setiap tahunnya. Selain itu juga adanya perbedaan jumlah belanja langsung di setiap Kabupaten/Kota, hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja langsung tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada Kota Sabang sebesar Rp 9.577.942 Per Kapita. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kota Bireun yang mana anggaran belanja langsung terendah sebesar Rp 1.230.737 Per Kapita.

4.2.3 Analisa Deskriptif Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan perkiraan belanja yang tak berkaitan langsung terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung adalah belanja dalam menunjang program pemerintahan yang terdiri dari gaji pegawai (pegawai negeri sipil), belanja subsidi, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil antar bagian negara, belanja bantuan antar bagian negara, serta belanja diluar dugaan lainnya. Dalam melihat besaran

anggaran belanja tidak langsung, di Kabupaten/Kota provinsi Aceh tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2016-2020

Kabupaten/Kota	Belanja Langsung (Per Kapita)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	5,348,484	4,921,639	4,516,251	4,659,330	4,649,431
Aceh Singkil	3,567,825	3,286,467	3,251,370	3,474,025	3,436,907
Aceh Selatan	3,429,798	3,573,243	3,506,880	3,512,880	3,423,387
Aceh Tenggara	3,947,870	3,125,081	3,732,140	3,514,400	3,462,355
Aceh Timur	2,443,424	2,681,330	2,524,727	2,604,998	2,567,503
Aceh Tengah	4,074,646	4,200,457	3,526,198	3,593,184	3,863,603
Aceh Barat	3,845,191	3,680,695	3,513,067	3,675,213	3,658,042
Aceh Besar	2,880,054	2,753,692	2,640,630	2,739,902	2,910,008
Pidie	3,028,511	2,842,378	2,904,054	2,884,111	3,186,050
Bireuen	2,905,628	2,714,640	2,581,661	2,633,922	2,702,021
Aceh Utara	2,700,886	2,639,448	2,565,620	2,661,126	2,682,630
Aceh Barat Daya	3,487,559	3,329,193	3,062,095	3,182,395	3,133,726
Gayo Lues	4,392,246	4,715,789	5,009,719	4,782,359	4,989,606
Aceh Tamiang	2,272,217	2,172,839	2,041,070	2,151,038	2,286,879
Nagan Raya	3,370,104	3,472,097	3,361,746	3,373,343	3,420,675
Aceh Jaya	5,270,377	5,297,262	5,082,943	5,489,386	5,393,106
Bener Meriah	3,727,572	3,701,290	3,454,641	3,682,268	3,592,241
Pidie Jaya	3,174,884	3,152,427	4,749,859	3,258,754	3,134,483
Banda Aceh	2,722,346	2,237,787	2,206,095	2,438,471	2,126,643

Tabel 4.4 -Lanjutan

Kabupaten/Kota	Belanja Langsung (Per Kapita)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sabang	8,042,145	10,153,335	7,893,610	8,219,304	8,349,907
Langsa	2,651,250	2,485,050	2,360,112	2,418,741	2,388,148
Lhokseumawe	2,439,975	2,108,101	1,967,641	1,989,460	1,961,842
Subulussalam	4,237,455	4,077,739	3,413,701	3,544,837	2,375,652

Sumber : Data diolah 2022

Tabel 4.3 di atas memperlihatkan bahwa belanja tidak langsung mengalami perubahan di setiap tahunnya. Selain itu juga adanya perbedaan jumlah belanja tidak langsung di setiap Kabupaten/Kota, hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja tidak langsung tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada Kota Sabang sebesar Rp 8,349,907 Per Kapita. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Kota Lhokseumawe yang mana anggaran belanja tidak langsung terendah sebesar Rp 1,961,842 Per Kapita.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Statistik Deskriptif

Hasil Statistik deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif

	Statistik Deskriptif		
	Kemiskinan (%)	Belanja Langsung (Rupiah Per Kapita)	Belanja Tidak Langsung (Rupiah Per Kapita)
Mean	16,35	3.271.079	3.541.970

Tabel 4.5 - Lanjutan

	Statistik Deskriptif		
	Kemiskinan (%)	Belanja Langsung (Rupiah Per Kapita)	Belanja Tidak Langsung (Rupiah Per Kapita)
Maximum	22,11	11.175.948	10.153.335
Minimum	6,9	1.115.687	1.961.842

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, belanja langsung, dan belanja tidak langsung setiap wilayah Aceh relatif berbeda. Perbedaan tersebut terlihat pada daerah dalam waktu yang berbeda dan juga antar kabupaten/kota. Hasil deskriptif terhadap tingkat kemiskinan memiliki persentase rata-rata sebesar 16,35%. Tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 22,11% yaitu pada tahun 2017 di Kota Aceh Singkil dan tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,9% yaitu pada tahun 2020 di Kota Banda Aceh.

Hasil Deskriptif Terhadap Belanja Langsung memiliki rata-rata sebesar Rp 3.271.079 per kapita. Anggaran Belanja Langsung tertinggi sebesar Rp 11.175.948 per kapita yaitu pada tahun 2019 di Kota Sabang dan Anggaran belanja langsung terendah sebesar Rp 1.115.687 per kapita yaitu pada tahun 2018 di Kabupaten Aceh Utara.

Hasil Deskriptif Terhadap Anggaran Belanja Tidak Langsung memiliki rata-rata sebesar Rp 3.541.970 per kapita. Anggaran Belanja Tidak Langsung tertinggi sebesar Rp 10.153.335 per kapita yaitu pada tahun 2017 di Kota Sabang dan Anggaran Belanja Tidak Langsung terendah sebesar Rp 1.961.842 per kapita yaitu pada tahun 2020 di Kota Lhokseumawe.

4.3.2 Koefisien Korelasi

Hasil Koefisien Korelasi antar ketiga variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Koefisien Korelasi

Variabel	Koefisien Korelasi		
	LOG(KM)	LOG(BL)	LOG(BTL)
LOG(KM)	1		
LOG(BL)	0,269	1	
LOG(BTL)	0,422	0,780	1

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Pada Tabel 4.6 menunjukkan korelasi antar setiap variabel. Tingkat kemiskinan berhubungan positif dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Hal tersebut memperlihatkan nilai *koefisien korelasi* setiap variabel sebesar 0,269 dan 0,422, menandakan bahwa terdapat hubungan searah pada satu sisi antara tingkat kemiskinan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Peningkatan belanja langsung dan belanja tidak langsung di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh dapat menekan angka kemiskinan.

Hubungan koefisien korelasi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung bernilai positif dengan hasil koefisien korelasi pada Tabel 4.6 di atas sebesar 0,780. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja langsung selaras dengan peningkatan belanja tidak langsung di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh.

4.3.3 Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi Model Regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Berikut Hasil estimasi model regresi:

Tabel 4.7
Estimasi Model Regresi Data Panel

Dependent Variabel : LOG(KM)						
	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien Estimasi [<i>t-Statistic</i>]	<i>P-Value</i>	Koefisien Estimasi [<i>t-Statistic</i>]	<i>P-Value</i>	Koefisien Estimasi [<i>t-Statistic</i>]	<i>P-Value</i>
C	-2,568 [-2,444]	0,016	-0,887 [-0,888]	0,376	-0,984 [-1,075]	0,284
LogBL	-0,078 [-1,117]	0,266	0,113 [3,746]	0,000	0,109 [3,718]	0,000
LogBTL	0,432 [3,968]	0,000	0,130 [2,114]	0,037	0,141 [2,429]	0,016
R²	0,187		0,972		0,972	
Adjusted R²	0,172		0,964		0,964	
F-statistic	12,893		130,480		130,480	
Prob(F-stat)	0,000		0,000		0,000	
DW stat	0,070		1,058		1,058	
Residual Cross- Section Dependence Test	Chow-test		Hausman Test			
	Effects	Stat	p-value	Test	X ² Stat	p-value
	Test			Summary		
	Cross-section F	114,936	0,000	Cross-section random	2,275	0,320
	Cross-section X ²	387,617	0,000	Breusch-Pagan LM	861,078	0,000
	Breusch-Pagan LM	862,373	0,000	Pesaran scaled LM	27,032	0,000
	Pesaran scaled LM	27,089	0,000	Pesaran CD	28,809	0,000

Tabel 4.7 - Lanjutan

	Chow-test		Hausman Test
Residual	Bias-	24,214	0,000
Cross-Section	corrected		
Dependence	scaled LM		
Test	Pesaran	28,865	0,000
	CD		

Sumber: Data Sekunder (Diolah, 2022).

Angka di dalam tanda [] adalah nilai t-statistik,

nilai standar error; p-value < 0,05 mengindikasikan signifikan pada keyakinan 95%

Model estimasi regresi data panel yang paling sederhana merupakan model *common effect*. Hasil estimasi *model common effect* dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada Tabel 4.7 diatas maka model umum *common effect model* yaitu:

$$LKMit = -2,568 - 0,078BLit + 0,432BTLit$$

Model estimasi regresi data panel *fixed effect model* merupakan estimasi regresi yang menunjukkan perbedaan konstan antar objek. Hasil estimasi *Fixed effect model* dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada Tabel 4.7 diatas maka model umum *fixed effect model* yaitu:

$$LKMit = -0,887 + 0,130BLit + 0,113BTLit$$

Model estimasi regresi data panel *Random Effect Model* merupakan estimasi regresi yang menunjukkan perbedaan karakteristik individu seta waktu yang diakomodasikan pada *error* melalui model. Hasil estimasi *Fixed effect model* dapat dilihat pada Tabel 4.7. Berdasarkan *output* estimasi yang terdapat dalam Tabel 4.7 diatas maka model umum *random effect model* yaitu:

$$LKMit = -0,984 + 0,141BLit + 0,109BTLit$$

Hasil *Uji Chow test* digunakan untuk memilih model apakah yang akan dipakai *common effect* atau *fixed effect* dengan acuan pada nilai *p-value* untuk *cross-section* F berdasarkan penentuan jika *p-value* lebih besar dari 0,05. Maka

yag dipilih merupakan *common effect*. Sebaliknya apabila *p-value* lebih kecil dari 0,05 dari hasil tersebut maka model terpilih ialah *fixed effect*. Hasil *uji Chow test* diperlihatkan pada Tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai *p-value cross section F* sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil tersebut dapat dilihat jika statistik H_0 di tolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu berdasarkan hasil *uji Chow test* model estimasi yang dipilih ialah *fixed effect model*.

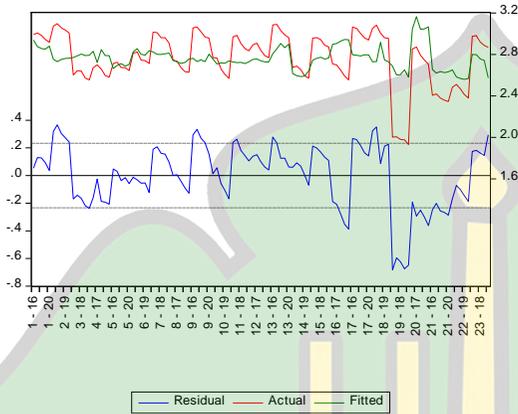
Penggunaan *Uji Hausman test* untuk memilih model apa yang akan dipakai *fixed effect* atau *random effect*. Penentuan dari model tersebut dapat dilihat pada nilai *p-value cross-section random* dengan ketentuan apabila nilai *p-value* lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *random effect*. Sedangkan apabila nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih ialah *fixed effect*. Hasil *uji Hausman test* seperti ditunjukkan dalam Tabel 4.7 menunjukkan hasil nilai *p-value Cross-section random* sebesar $0,320 > 0,05$. Oleh karena maka dapat statistik H_0 di terima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu berdasarkan hasil *Uji Hausman Test* model estimasi yang terpilih dalam menganalisis data ini adalah *random effect*.

4.3.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model analisis digunakan untuk menganalisis pengaruh antar variable. Terdapat tiga pendekatan dalam model pengolahan data tersebut yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam memilih pendekatan sebagai alat estimasi yang paling tepat untuk di gunakan didasarkan pada perbandingan gambar residual yang dihasilkan oleh ketiga metode tersebut seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.2, Gambar 4.3, dan Gambar 4.4.

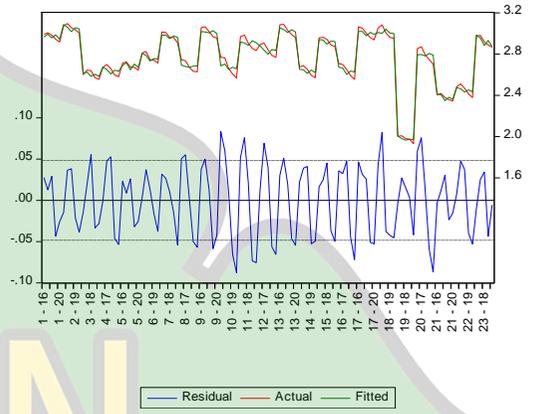
Gambar 4.2

Residual Metode Common Effect Model



Gambar 4.3

Residual Metode Fixed Effect Model

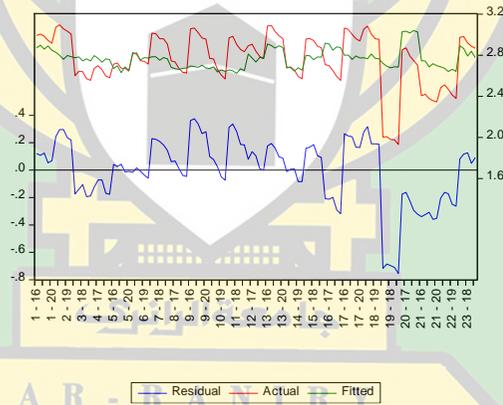


Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Gambar 4.4

Residual Metode Random Effect Model



Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Pada Gambar 4.2 dapat kita lihat residual yang dihasilkan dari pendekatan *common effect model*. Pada gambar tersebut diketahui bahwa variasi/fluktuasi garis aktual memiliki kecenderungan yang berbeda dengan fluktuasi garis fitted. Kemudian, Gambar 4.3 menunjukkan residual regresi panel yang muncul dari penggunaan pendekatan *fixed effect model*. Gambar 4.3 memperlihatkan variasi/fluktuasi garis aktual hampir sama dengan fluktuasi garis fitted. Pada Gambar 4.4 menunjukkan residual regresi panel yang muncul dari penggunaan pendekatan *random effect model*. Dapat dilihat pada gambar tersebut jika variasi/fluktuasi garis aktual cenderung berbeda dengan fluktuasi garis fitted.

Berdasarkan perbandingan garis aktual dan garis pas dalam ketiga gambar diatas, memperoleh kesimpulan jika pendekatan model *fixed effect* memberikan estimasi yang lebih akurat memiliki perbandingan dengan pendekatan model *common effect* dan *random effect*. Maka dari itu, regresi panel yang terpilih dalam penelitian ini serta digunakan untuk keperluan analisis adalah *fixed effect model*.

4.3.5 Model Regresi Data Panel Terpilih

Jika dilihat dari pemilihan model regresi maka model yang terpilih ialah *fixed effect model*. Hasil dari model regresi *fixed effect model* dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil *fixed effect model* Sebagai Model Regresi Terpilih

Dependent Variable: LOG(KM)
Method: Panel Least Squares
Date: 11/06/22 Time: 01:04
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BL)	0.113531	0.030305	3.746333	0.0003
LOG(BTL)	0.130715	0.061820	2.114449	0.0372
C	-0.887043	0.998352	-0.888507	0.3766
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.972063	Mean dependent var	2.764648	
Adjusted R-squared	0.964613	S.D. dependent var	0.256780	
S.E. of regression	0.048304	Akaike info criterion	-3.032948	
Sum squared resid	0.209994	Schwarz criterion	-2.436223	
Log likelihood	199.3945	Hannan-Quinn criter.	-2.790740	
F-statistic	130.4807	Durbin-Watson stat	1.058690	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Berdasarkan hasil estimasi yang terdapat pada Tabel 4.8 diatas maka persamaan model umum *fixed effect model* yaitu:

$$LKM_{it} = -0,887 + 0,130BL_{it} + 0,113BTL_{it}$$

Dari persamaan tersebut dapat dianalisis bahwa Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengaruh tersebut di didasrkan oleh koefisien estimasi sebesar 0,130 (P-value = 0,0003 < 0,05). Berdasarkan angka tersebut dapat di artikan bahwa setiap peningkatan belanja langsung per kapita sebesar 1% dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,130 dengan asumsi belanja tidak langsung tetap.

Belanja tidak langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengaruh tersebut di dasarkan

oleh koefisien estimasi sebesar 0,113 ($P\text{-value} = 0,0372 > 0,05$). Berdasarkan angka tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan belanja tidak langsung per kapita sebesar 1% dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,113. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja tidak langsung yang diterima daerah Kabupaten Kota Provinsi Aceh mampu berkontribusi secara nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

4.3.6 Pengujian Asumsi

Pengujian asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengujian *normalitas*, *multikolinearitas* dan *heteroskedastisitas*. Maka hasil dari pengujian asumsi penelitian ini sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

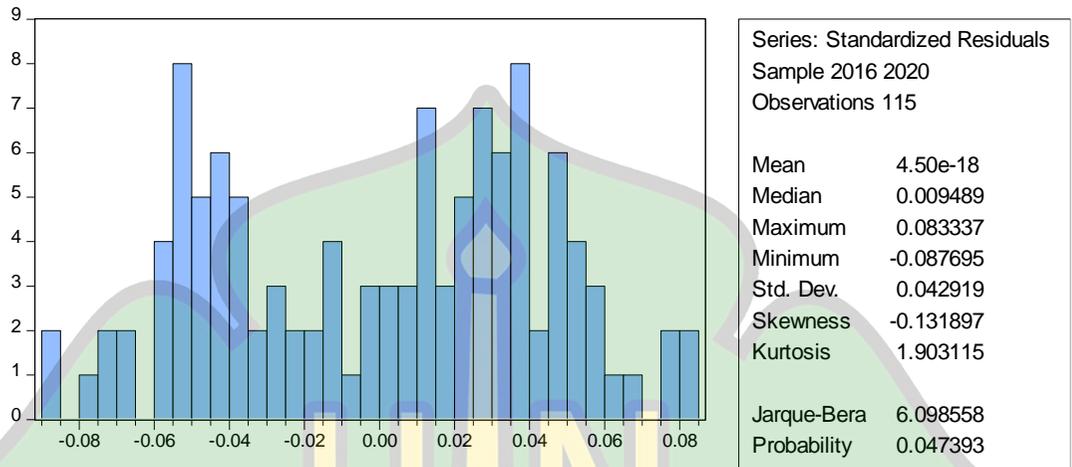
Uji *Normalitas* memiliki tujuan guna mengetahui *residual* data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis pengujian sebagai berikut:

H_0 : Data berdistribusi normal

H_a : Data berdistribusi tidak normal

Statistik Pengujian dengan Uji Jarque-Bera (JB) 5%. H_0 ditolak jika $JB < 0,05$. Sebaliknya, H_1 diterima jika $JB > 0,05$.

Gambar 4.4
Uji Normalitas



Sumber : *Output Eviews Data di Olah (2022)*

Hasil dari gambar 4.4 diatas dapat menunjukkan nilai *Jarque-Bera* yang didapat sebesar 6,098 dengan nilai *probability* 0,04. Nilai *Probability* <0,05 sehingga H_1 diterima. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan jika data residual berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian *multikolinearitas* digunakan guna menentukan apakah antara variabel independen memiliki hubungan atau tidak. Pengujian ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai adjusted-R² yang diperoleh dari proses regresi dengan nilai koefisien korelasi (r) antara sesama variabel independen. *Multikolinearitas* terjadi apabila nilai korelasi di atas 0,90 dan apabila nilai korelasi di bawah 0,90 maka dapat dikatakan tidak terjadi *multikolinearitas*. Hasil pengujian *multikolinearitas* dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Koefisien Korelasi	
	LOG(BL)	LOG(BTL)
LOG(BL)	1	0,780
LOG(BTL)	0,780	1

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Pada Tabel 4.9 memperlihatkan jika nilai koefisien korelasi antar variable independen sebesar $0,780 < 0,90$. Oleh sebab itu maka data dapat diartikan tidak terjadi masalah *multikolinearitas* antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan guna melihat varians residuan dengan asumsi pengujian sebagai berikut:

Hipotesis

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H1 : Terdapat heteroskedistisitas

Pengujian ini menggunakan uji *Glejser* yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolut. Hasil uji Glejser tersaji pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Nilai Uji Glejser

No	Variabel	Probability
1	Belanja Langsung (BL)	0.986
2	Belanja Tidak Langsung (BTL)	0.458

Sumber : Output Eviews Data di Olah (2022)

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil nilai *probability* dari seluruh variabel independen $> 0,05$. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dipakai pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pengujian hipotesis parsial, hipotesis berganda dan koefisien determinasi. Berdasarkan estimasi regresi *Fixed Effect model* yang terpilih.

Tabel 4.11
Uji Hipotesis Berdasarkan Model Regresi Terpilih

Dependent Variable: LOG(KM)
Method: Panel Least Squares
Date: 11/06/22 Time: 01:04
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BL)	0.113531	0.030305	3.746333	0.0003
LOG(BTL)	0.130715	0.061820	2.114449	0.0372
C	-0.887043	0.998352	-0.888507	0.3766

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.972063	Mean dependent var	2.764648
Adjusted R-squared	0.964613	S.D. dependent var	0.256780
S.E. of regression	0.048304	Akaike info criterion	-3.032948
Sum squared resid	0.209994	Schwarz criterion	-2.436223
Log likelihood	-199.3945	Hannan-Quinn criter.	-2.790740
F-statistic	130.4807	Durbin-Watson stat	1.058690
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews (2022)

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian Hipotesis Parsial Uji t dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikan *probabilitas* $< 0,05$ berarti variabel independen secara parsial

berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikan *probabilitas* $> 0,05$ berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan *probabilitas* dilihat pada hasil output regresi dengan model *fixed effect model* pada Tabel 4.11. Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Hipotesis Pertama (H1)

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *fixed effect model* pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikan *probabilitas* sebesar $0,0003 < 0,05$. Melalui hasil tersebut H1 dinyatakan diterima, berarti belanja langsung secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

b. Hipotesis Kedua (H2)

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *fixed effect model* pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai signifikan *probabilitas* sebesar $0,0372 < 0,05$. Maka hasil tersebut menyatakan H2 diterima, berarti belanja tidak langsung secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan membandingkan F statistik dengan F Tabel pada signifikan $0,05$ atau $\alpha = 5\%$. Kriteria pengujian ini sebagai berikut:

a. Jika $\text{Sig F} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika $\text{Sig F} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output regresi dengan model *fixed effect model* pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas F statistik sebesar $0,000 < 0,05$. Maka hasil tersebut menyatakan H_0 ditolak, dapat disimpulkan belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan tingkat kemampuan dari variable independen dalam menerangkan variable dependen. Dalam penelitian ini nilai R^2 yang di peroleh dalam estimasi regresi *fixed effect model* pada Tabel 4.11 sebesar 0,9720 atau 97,20%. Nilai R^2 tersebut menunjukkan kemampuan belanja langsung dan belanja tidak langsung menerangkan tingkat kemiskinan sebesar 97,20%.

4.5 Hasil Pembahasan

4.5.1 Belanja Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diatas memperlihatkan nilai *prob* sebesar $0,0003 < 0,05$. Hasil tersebut menandakan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Belanja langsung merupakan belanja atau pengeluaran yang berkaitan secara langsung terhadap pelaksanaan suatu kegiatan (program) dari pemerintah pusat. Belanja langsung mempunyai peranan penting terhadap mampunya daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan program pemerintahan di daerah. Pengalokasian belanja langsung oleh pemerintah Aceh berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dengan mengalokasikan anggaran pada isu-isu produktif seperti anggaran pembangunan dan anggaran

infrastruktur. Pembangunan dan infrastruktur lokal yang lebih baik dapat menarik investor baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Demikian halnya dengan ekonomi Islam. Dharuriyat adalah perwujudan pelaksanaan kemaslahatan agama dan dunia, apabila ketika dharuriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia serta bahkan akhirat juga akan hilang, kemudian yang akan muncul justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyah ini dimana tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Keperluan dan perlindungan dharuriyah ini dalam buku ushul fiqh, termaksud as-syhibi, membagi menjadi lima perkara (al-kulliyat al-khams), yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperuntukkan untuk Agama, Hidup atau jiwa, Keluarga atau keturunan, Harta atau kekayaan, dan Intelek atau akal (Dedi, 2018).

Hajiyat, didefinisikan guna mempermudah dalam kehidupan, menghilangkan hal yang sulit ataupun menjadikannya sebagai pemeliharaan yang lebih baik dalam lima unsur pokok diatas. Hajiyah terkadang diartikan sebagai suatu keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Maka hal tersebut dapat menambah efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi aktivitas manusia (Sodiq, 2015).

Tahsiniyat, merupakan guna manusia dapat melaksanakan yang terbaik dalam penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok diatas. Tidak dikategorikan dalam menghapus maupun mengurangi berbagai kesulitan, akan tetapi sebagai pelengkap, penerang, serta penghias kehidupan manusia. Meskipun hal ini kemungkinan besar tidak akan menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah dari aktivitas manusia. Tahsiniyah identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Akbar dan Febriadi, 2018).

Belanja langsung memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian kemiskinan. Tujuan utama dari ekonomi Islam ialah kesejahteraan dalam mencapai Falah. Terwujudnya kesejahteraan menurut Islam dalam hal ini harus terpenuhinya fasilitas umum yang dapat membantu masyarakatnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari (Jory S Dauhan, et., al, 2020).

Hal ini sesuai dengan penelitian Teddy, Veckie, Rumate, dan Debby (2019) di kota Bitung, Penelitian ini memperoleh hasil jika belanja langsung dan tidak langsung berupa suatu desakan yang paling efektif dari pemerintah dalam tujuan meningkatkan perekonomian sampai saat ini. Investasi dapat menjadi titik awal untuk pertumbuhan yang sukses dan berkelanjutan di masa depan. Karena investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya pengurangan kemiskinan. Namun bertolak belakang dengan penelitian di atas yang menjelaskan bahwa belanja langsung dapat menekan tingkat kemiskinan, penelitian yang dilakukan Patricia, Ita, dan Hanly (2021) malah menemukan bukti bahwa Belanja Langsung tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap angka Kemiskinan di kota.

4.5.2 Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perpektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan memperlihatkan nilai *probabilitas* sebesar $0,0372 < 0,05$. Hasil tersebut menandakan bahwa belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Dengan demikian belanja tidak langsung yang dikeluarkan pemerintah daerah Kab/Kota di Provinsi Aceh memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Belanja tidak langsung lebih berfokus pada kualitas layanan dasar diantaranya kesehatan, pendidikan, tersedianya layanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu kota, termasuk belanja tidak langsung. Dengan dana belanja yang lebih besar diharapkan kebutuhan pokok dapat terpenuhi, potensi perekonomian daerah akan tumbuh yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya pendapatan akan berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu angka kemiskinan akan menurun. Ketentuan ekonomi Islam yang bahwa karakteristik dalam ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan, bertanggung jawab, mencukupi dan realistis dan tidak lupa pula harus sejalan dengan Al-Quran dan Hadis.

Tingkat kemiskinan dalam ekonomi Islam dapat dilihat melalui terpenuhinya dan terpeliharanya maqashid syariah yaitu dharuriyat, hajiyyah, dan tahsiniyah. Dalam konteks kemiskinan dharuriyah menjadi acuan penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang mana diantaranya harus memenuhi lima unsur pokok antara lain agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafsi*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*). Belanja tidak langsung yang dijalankan oleh pemerintahan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kelima unsur tersebut yaitu melalui belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan sebagainya.

Tujuan subsidi belanja tidak langsung ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana penelitian Rizki Syamsuri TN dan Agus Bandiyono (2018) menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pada belanja pendidikan, ekonomi dan jaminan sosial berdampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan arah hasilnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran akan menurunkan indeks kemiskinan. Sejumlah peneliti lainnya juga menemukan bukti kuat

bahwa belanja tidak langsung berdampak positif terhadap kemiskinan (Jouzar farouq ishak, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Patricia, Ita, dan Hanly (2021) yang menyatakan bahwa Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan di kota Manado.

4.5.3 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Tingkat Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas memperlihatkan nilai *probabilitas* F statistik sebesar $0,000 < 0,05$. Dari hasil nilai probabilitas pada pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Pemanfaatan Belanja Pemerintah berorientasi tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi berorientasi juga menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta ketidakmampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jenis belanja pemerintah yang dapat diidentifikasi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan diantaranya adalah pengeluaran untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dasarnya memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Pemenuhan lima unsur utama dalam maqashid syariah yang diantaranya agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafsi*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*), intelek atau akal (*aql*) dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Apabila kelima unsur tersebut dapat dipenuhi akan berakibat pada kesejahteraan dan kemuliaan

dalam kehidupan didunia serta di akhirat, atau disebut dalam ekonomi Islam disebut dengan *Falah*. Unsur-unsur tersebut ialah suatu kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib di penuhi oleh masyarakat, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat mempengaruhi utilitas. Jika tidak melakukan lima hal ini dengan benar, hidup akan kurang sempurna atau kelangsungan hidup akan terpengaruh.

Dalam Islam kemiskinan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Menurut madzhab syafi'i dan hambali definisi fakir yaitu individu yang tidak berpenghasilan dikarenakan adanya alasan khusus yang syar'i, diantaranya factor umur, dan memiliki kesibukan pendakwaan yang mengakibatkan tidak sempatnya bekerja. Ketentuan ekonomi Islam yang bahwa karakteristik dalam ekonomi Islam harus memenuhi aspek keadilan, bertanggung jawab, mencukupi dan realistis dan tidal lupa pula harus sejalan dengan Al-Quran dan Hadis. Terpenuhinya Karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam mencerminkan keberhasilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala aspek secara merata sehingga angka kemiskinan juga ikut menurun. Dikarenakan tujuan utama dari ekonomi Islam ialah kesejahteraan dalam mencapai *Falah*.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal tersebut menandakan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama-sama dapat mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi publik diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan dimana belanja pada bidang-bidang produktif belum berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga belanja langsung belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.
3. Belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja tidak langsung masih kurang berkontribusi pada kebutuhan masyarakat umum. Sehingga besarnya pengeluaran belanja tidak langsung tidak menyebabkan penurunan angka kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran belanja pemerintah. Diantaranya dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang ada untuk hal-hal yang dinilai produktif dalam menunjang pendapatan masyarakat yang berakibat pada penurunan tingkat kemiskinan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian seperti menambah teori pendukung dalam Perspektif ekonomi Islam, menambah atau menggunakan variabel independen selain belanja langsung dan belanja tidak langsung seperti pendapatan asli daerah, pendapatan perkapita dan lain sebagainya. Dikarenakan masih memiliki kekurangan seperti data dan periode waktu yang digunakan hanya 5 tahun. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik guna melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- AFINIE, A. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Afrida, R., Usman, U., & Abbas, T. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 4(2), 23-29.
- Akbar, M., & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Konsep Dharuriyyat , Hajiyyat Dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung Review Of Dharuriyyat Concept , Hajiyyat And Tahsiniyyat On Financing Implementation In BTN Syariah Branch Office Bandung City. Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, 2, 745–753.
- Al-Mubarakfuri, S., & Al-Atsari, A. I. (2011). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*.
- Amaliyah, N. (2021). *Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).
- Amri, K. (2020). Kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Bukti data panel di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 8(1), 1-18.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahalli, J. (2003). *Tafsir jalalain*. Surabaya: Imaratullah.

Awalurramadhana, A., Zuhlilmi, M., & Safitri, W. D. (2021). Analisis Hubungan Pengeluaran Perkapita dan Status Gizi Buruk Terhadap Kemiskinan Dengan Pengaruh Wilayahn Provinsi Aceh Tahun 2015-2016. *EKOBIS SYARIAH*, 2(2), 11-23.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10027>

Bandiyono, A. (2018). Pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi terhadap peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11-28.

Bawimbang, P. M., Rorong, I. P., & Siwu, H. D. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).

Dedi, S. (2018). Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari'ah). *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.30983/Alhurriyah.V3i1.554>

ELILIA, L. N. (2021). Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2012-2019.

Euspi, I. I. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010-2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Fitri, C. D., Safitri, W. D., & Chairunnas, C. (2021). Analisis pengaruh penduduk usia produktif yang tidak bekerja, zakat, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Ekobis Syariah*, 1(2), 1-10.

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v1i2.9996>

- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Vol. 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: teori, konsep, dan aplikasi dengan eview 10.
- Gujarati, Damodar N. 2012. Dasar-Dasar ekonometrika Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). *Handbook on poverty+ inequality*. World Bank Publications.
- <https://quranhadits.com> (2020) Quran Al-Baqarah/Al-Baqarah ayat 273.
- <https://quranhadits.com> (2020) Quran An-Nisa Ayat 4.
- <https://tafsirjalalainindonesia.blogspot.com> (2017) Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 266-270.
- Ishak, J. F. (2017). Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap kemiskinan. *Jurnal akuntansi dan bisnis*, 17(1), 55-59.
- Kaat, M. H., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 18(6).
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 1-7.
- Kasdi, A., & Kudus, D. S. (2014). Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab. Yudisia, 63.

- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). Pengantar Ekonomi Mikro Principles of Economics. *Salemba Empat, Jakarta*.
- Masyithah, N., & Nasir, M. (2018). Pengaruh Belanja Langsung Dan IPM Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 547-554.
- Minggu, T. D., Rimate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 18(2).
- Mujahidin, A. (2008). Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, 7(1), 168-184.
- Mujahidin, A. (2017). Pengentasan Kemiskinan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, 7(1), 168-184.
- Nugroho, B. A. Dedi. 2011. *The analysis of balanced scorecard (BSC) in evaluating the performance of KUD "DAU" Malang. Article in Indonesian. Agrise XI*, 65-80.
- Rahmawati, S. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Melalui Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2004–2016 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Safitri, A. (2019). Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017 (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh). DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10033>

- Sinaga, I. D. (2020). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2015–2019* (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USUpress.
- Sodiq. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 54–98.
- Statistik, B. P. (2016). Provinsi Aceh dalam angka. *BPS Provinsi Aceh*, 413.
- Statistik, B. P. (2020). Provinsi Aceh. *Profil Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Aceh Maret 2018*, (31/07).
- Sugiyono, A. (2010). Pengembangan Energi Alternatif di Daerah Istimewa Yogyakarta: Prospek Jangka Panjang. In *Proceeding Call for Paper Seminar Nasional VI Universitas Teknologi Yogyakarta* (pp. 1-13).
- Sugiyono, M. S. (2018). Metodologi Penelitian Dilengkapi dengan Metode R&D.
- Tambunan, T. T. (2014). The Importance of MSMEs for the Development of Women Entrepreneurship: a Story from Indonesia. *Przedsiębiorczość i Zarządzanie*, 15(7, cz. 1. Firmy Rodzinne-współczesne nurty badań i praktyki zarządzania), 343-363.
- Winarno, S. (2011). House seismic vulnerability and mitigation strategies: Case of Yogyakarta City. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 2(2), 51-58.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Tabulasi Data Panel

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	19.93%	20.20%	19.78%	18.99%	18.49%
Aceh Singkil	21.60%	22.11%	21.25%	20.78%	20.20%
Aceh Selatan	13.48%	14.07%	14.01%	13.09%	12.87%
Aceh Tenggara	14.46%	14.86%	14.29%	13.43%	13.21%
Aceh Timur	15.06%	15.25%	14.49%	14.47%	14.08%
Aceh Tengah	16.64%	16.84%	15.58%	15.50%	15.08%
Aceh Barat	20.38%	20.28%	19.31%	19.31%	18.34%
Aceh Besar	15.55%	15.41%	14.47%	13.92%	13.84%
Pidie	21.25%	21.43%	20.47%	19.46%	19.23%
Bireuen	15.95%	15.87%	14.31%	13.56%	13.06%
Aceh Utara	19.46%	19.78%	18.27%	17.39%	17.02%
Aceh Barat Daya	18.03%	18.31%	17.10%	16.26%	15.93%
Gayo Lues	21.86%	21.97%	20.70%	19.87%	19.32%
Aceh Tamiang	14.51%	14.69%	14.21%	13.38%	13.08%
Nagan Raya	19.25%	19.34%	18.97%	17.97%	17.70%
Aceh Jaya	15.01%	14.85%	14.16%	13.36%	12.87%
Bener Meriah	21.43%	21.14%	20.13%	19.30%	18.89%
Pidie Jaya	21.18%	21.82%	20.17%	19.31%	19.19%
Banda Aceh	7.41%	7.44%	7.25%	7.22%	6.90%
Sabang	17.33%	17.66%	16.31%	15.60%	14.94%
Langsa	11.09%	11.24%	10.79%	10.57%	10.44%

Lhokseumawe	11.98%	12.32%	11.81%	11.18%	10.80%
Subulussalam	19.57%	19.71%	18.51%	17.95%	17.60%

Anggaran Belanja Langsung Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Belanja Langsung (Per Kapita)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	4,139,415	5,844,131	4,638,987	5,922,469	4,024,470
Aceh Singkil	4,718,547	4,059,336	2,852,458	3,678,858	3,364,582
Aceh Selatan	3,049,938	3,118,938	2,250,218	2,708,784	2,290,757
Aceh Tenggara	3,066,988	3,320,542	1,838,083	2,724,174	2,558,098
Aceh Timur	1,816,144	2,067,427	1,212,909	1,928,770	1,456,807
Aceh Tengah	3,953,366	3,166,400	2,408,048	2,927,753	2,547,465
Aceh Barat	2,873,232	3,029,670	2,392,279	2,829,668	2,558,167
Aceh Besar	1,639,872	1,532,672	1,486,429	1,591,074	1,496,628
Pidie	1,713,332	1,787,198	1,607,151	1,954,959	1,358,247
Bireuen	1,459,776	1,850,387	1,232,657	1,450,083	1,230,737
Aceh Utara	1,401,463	1,342,668	1,115,687	1,596,010	1,332,356
Aceh Barat Daya	4,219,870	3,111,456	2,433,783	3,484,404	3,205,013
Gayo Lues	7,569,430	6,069,718	4,409,516	5,815,940	4,642,062
Aceh Tamiang	2,283,259	2,308,062	1,821,430	2,298,287	1,708,754
Nagan Raya	3,855,710	3,606,667	2,639,179	3,362,822	3,237,369
Aceh Jaya	6,432,300	5,991,096	3,612,261	4,433,859	4,164,206
Bener Meriah	3,450,247	3,522,585	2,607,764	3,280,985	2,838,910
Pidie Jaya	3,381,179	3,127,814	2,816,416	3,085,073	3,135,639
Banda Aceh	2,501,510	2,476,252	2,221,749	2,111,860	2,478,249

Sabang	10,175,629	7,973,100	9,439,993	11,175,948	9,577,942
Langsa	3,261,977	3,469,756	2,183,538	2,842,810	2,409,010
Lhokseumawe	2,121,510	2,265,052	1,847,120	2,226,089	1,870,568
Subulussalam	6,770,134	5,510,829	3,595,712	5,216,355	4,971,113

Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2016-2020

Kabupaten/Kota	Belanja Langsung (Per Kapita)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	5,348,484	4,921,639	4,516,251	4,659,330	4,649,431
Aceh Singkil	3,567,825	3,286,467	3,251,370	3,474,025	3,436,907
Aceh Selatan	3,429,798	3,573,243	3,506,880	3,512,880	3,423,387
Aceh Tenggara	3,947,870	3,125,081	3,732,140	3,514,400	3,462,355
Aceh Timur	2,443,424	2,681,330	2,524,727	2,604,998	2,567,503
Aceh Tengah	4,074,646	4,200,457	3,526,198	3,593,184	3,863,603
Aceh Barat	3,845,191	3,680,695	3,513,067	3,675,213	3,658,042
Aceh Besar	2,880,054	2,753,692	2,640,630	2,739,902	2,910,008
Pidie	3,028,511	2,842,378	2,904,054	2,884,111	3,186,050
Bireuen	2,905,628	2,714,640	2,581,661	2,633,922	2,702,021
Aceh Utara	2,700,886	2,639,448	2,565,620	2,661,126	2,682,630
Aceh Barat Daya	3,487,559	3,329,193	3,062,095	3,182,395	3,133,726
Gayo Lues	4,392,246	4,715,789	5,009,719	4,782,359	4,989,606
Aceh Tamiang	2,272,217	2,172,839	2,041,070	2,151,038	2,286,879
Nagan Raya	3,370,104	3,472,097	3,361,746	3,373,343	3,420,675
Aceh Jaya	5,270,377	5,297,262	5,082,943	5,489,386	5,393,106
Bener Meriah	3,727,572	3,701,290	3,454,641	3,682,268	3,592,241
Pidie Jaya	3,174,884	3,152,427	4,749,859	3,258,754	3,134,483

Banda Aceh	2,722,346	2,237,787	2,206,095	2,438,471	2,126,643
Sabang	8,042,145	10,153,335	7,893,610	8,219,304	8,349,907
Langsa	2,651,250	2,485,050	2,360,112	2,418,741	2,388,148
Lhokseumawe	2,439,975	2,108,101	1,967,641	1,989,460	1,961,842
Subulussalam	4,237,455	4,077,739	3,413,701	3,544,837	2,375,652

Lampiran 2 – Hasil Output Eviews

Statistik Deskriptif

	KM	BL	BTL
Mean	16.35035	3271079.	3541970.
Median	16.31000	2838910.	3361746.
Maximum	22.11000	11175948	10153335
Minimum	6.900000	1115687.	1961842.
Std. Dev.	3.677342	1917617.	1378569.
Skewness	-0.511816	1.910215	2.246619
Kurtosis	2.705937	7.128379	9.440019
Jarque-Bera	5.435161	151.6045	295.4687
Probability	0.066034	0.000000	0.000000
Sum	1880.290	3.76E+08	4.07E+08
Sum Sq. Dev.	1541.605	4.19E+14	2.17E+14
Observations	115	115	115

Koefisien Korelasi

	LOG(KM)	LOG(BL)	LOG(BTL)
LOG(KM)	1	0.269	0.422
LOG(BL)	0.269	1	0.780
LOG(BTL)	0.422	0.780	1

Estimasi Regresi *Common Effect Model*

Dependent Variable: LOG(KM)
Method: Panel Least Squares
Date: 11/06/22 Time: 01:16
Sample: 2016 2020
Periods included: 5
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BL)	-0.078238	0.070000	-1.117687	0.2661
LOG(BTL)	0.432386	0.108963	3.968201	0.0001
C	-2.568037	1.050371	-2.444885	0.0160
R-squared	0.187154	Mean dependent var	2.764648	
Adjusted R-squared	0.172639	S.D. dependent var	0.256780	
S.E. of regression	0.233566	Akaike info criterion	-0.044966	
Sum squared resid	6.109931	Schwarz criterion	0.026641	
Log likelihood	5.585526	Hannan-Quinn criter.	-0.015901	
F-statistic	12.89373	Durbin-Watson stat	0.070893	
Prob(F-statistic)	0.000009			

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Estimasi Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOG(KM)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/22 Time: 01:04
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BL)	0.113531	0.030305	3.746333	0.0003
LOG(BTL)	0.130715	0.061820	2.114449	0.0372
C	-0.887043	0.998352	-0.888507	0.3766

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.972063	Mean dependent var	2.764648
Adjusted R-squared	0.964613	S.D. dependent var	0.256780
S.E. of regression	0.048304	Akaike info criterion	-3.032948
Sum squared resid	0.209994	Schwarz criterion	-2.436223
Log likelihood	199.3945	Hannan-Quinn criter.	-2.790740
F-statistic	130.4807	Durbin-Watson stat	1.058690
Prob(F-statistic)	0.000000		

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Estimasi Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: LOG(KM)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/06/22 Time: 01:14
 Sample: 2016 2020
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 115
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(BL)	0.109277	0.029385	3.718820	0.0003
LOG(BTL)	0.141397	0.058211	2.429034	0.0167
C	-0.984272	0.915578	-1.075028	0.2847

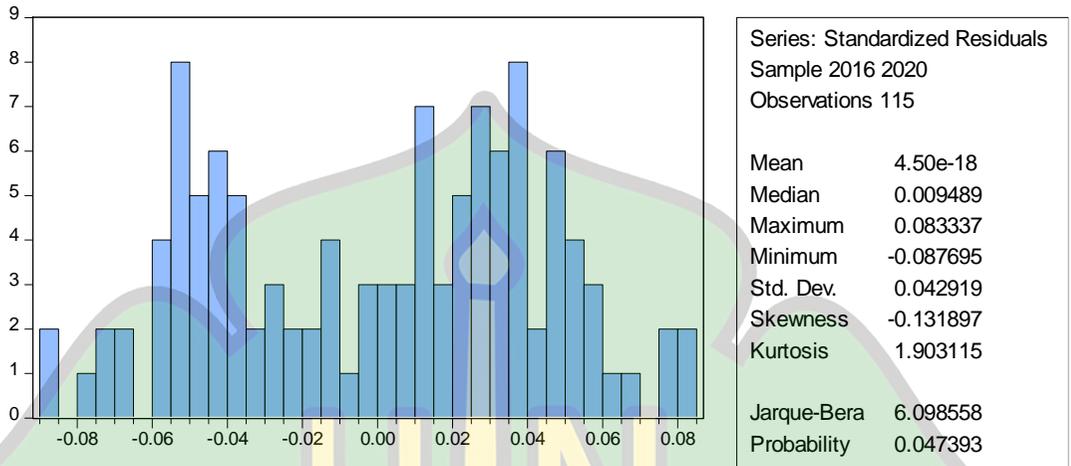
Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.237818	0.9604
Idiosyncratic random		0.048304	0.0396

Weighted Statistics			
R-squared	0.170836	Mean dependent var	0.250097
Adjusted R-squared	0.156029	S.D. dependent var	0.052644
S.E. of regression	0.048363	Sum squared resid	0.261969
F-statistic	11.53789	Durbin-Watson stat	0.841995
Prob(F-statistic)	0.000028		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.128839	Mean dependent var	2.764648
Sum squared resid	6.548270	Durbin-Watson stat	0.033685

A R - R A N I R Y

Pengujian Asumsi Uji Normalitas



Pengujian Asumsi Uji Multikolinearitas

	LOG(KM)	LOG(BL)	LOG(BTL)
LOG(KM)	1	0.269	0.422
LOG(BL)	0.269	1	0.780
LOG(BTL)	0.422	0.780	1



Pengujian Asumsi Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 11/17/22 Time: 23:20

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.822147	0.909090	0.904363	0.3682
LOG(BL)	-0.000479	0.027595	-0.017366	0.9862
LOG(BTL)	-0.041930	0.056293	-0.744859	0.4583

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.933246	Mean dependent var	0.185094
Adjusted R-squared	0.915445	S.D. dependent var	0.151264
S.E. of regression	0.043985	Akaike info criterion	-3.220271
Sum squared resid	0.174122	Schwarz criterion	-2.623547
Log likelihood	210.1656	Hannan-Quinn criter.	-2.978063
F-statistic	52.42630	Durbin-Watson stat	1.136660
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3 – Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Fitrayandi
NIM : 170602076
Tempat/Tanggal Lahir : Bireun/25-Desember-1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli,
Kabupaten Bireun
Nomor Telepon : 0852-1923-0212
Alamat E-mail : rizki.fitra12@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : LULUS 2011
SMP : LULUS 2014
SMA : LULUS 2017
UNIVERSITAS : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rusydi
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Zuryati
Pekerjaan : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Juli Cot Mesjid, Kecamatan Juli,
Kabupaten Bireun